PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM KABUPATEN, DAN DANA DESA TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH 2015-2023

SKRIPSI

Oleh:

Nama	: Nuraisya Rizali
NIM	: 21313140
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2025

HALAMAN JUDUL

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah 2015-2023

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama	: Nuraisya Rizali
NIM	: 21313140
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
2025

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2025

Penulis,



Nuraisya Rizali

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

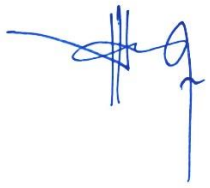
Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah 2015-2023

Nama	: Nuraisya Rizali
NIM	: 21313140
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Heri Sudarsono, SE, M.Ec

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2015-2023

Disusun oleh : NURAISYA RIZALI

Nomor Mahasiswa : 21313140

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 06 Agustus 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Heri Sudarsono, SE.,MEc

Penguji : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah , 6-8)

”Dan katakanlah : Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”

(QS. Taha, 114)

”Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(Hadist Riwayat Muslim)

”Ya Allah, jadikanlah ilmu yang aku pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah amal yang aku kerjakan sebagai amal yang diterima di sisi-Mu.”

(Doa Penuntut Ilmu)

”Setiap Langkah dalam menuntut ilmu adalah bentuk ibadah, dan setiap rintangan adalah ladang kesabaran yang membuahkan keberkahan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, sang pembawa cahaya ilmu dan petunjuk bagi umat manusia. Dengan hati yang penuh syukur dan cinta, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam diam, yang doanya menjadi pelindung dalam setiap langkah, dan kasih sayangnya tak pernah mengenal batas. Terima kasih atas segala cinta, keikhlasan, pengorbanan, serta nasihat yang senantiasa menguatkan. Untuk keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa, serta menjadi tempat pulang dari setiap lelah dan ragu. Para sahabat dan teman seperjuangan, yang tak pernah lelah menyemangati, yang hadir dalam setiap peluh perjuangan dan tawa sederhana di tengah tekanan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kemudian dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan perhatian, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang begitu berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Dan tidak lupa, untuk diri penulis sendiri, yang telah memilih untuk tetap berjuang ketika ingin menyerah, yang belajar untuk bangkit setiap kali jatuh, dan yang terus percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Semoga karya ini dapat menjadi amal jariyah, menjadi bagian kecil dari ilmu yang bermanfaat, dan menjadi awal dari langkah-langkah kebaikan berikutnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah 2015-2023", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, suri teladan dalam setiap langkah kehidupan, pembawa kebenaran dan cahaya bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi ilmu, pengalaman, maupun waktu. Namun, berkat doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan baik. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang menjadi sumber inspirasi dalam menuntut ilmu dan memperjuangkan kebaikan.
3. Bapak Heri Sudarsono, SE, M,Ec. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staff akademik Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, atas ilmu dan pengalaman yang diberikan selama masa perkuliahan.
5. Orang tua tercinta, mama Ritanti Sari Dewi, ayah Benarta Sigit Rizali, papa Agus Ramadhan, dan bunda Nike Herawati Subagyo yang menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa pamrih. Semoga

Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan bagi Ayah, Mama, Papa, dan Bunda.

6. Adek-adekku tersayang, Aziza Alliya Rizali, Al Arham Bintang Rizali, dan Al Zaidan Jibril Rizali yang selalu mendukung dengan tulus, menjadi penguat saat semangat mulai redup, serta menemani perjalanan panjang pendidikan ini.

7. Kepada saudara-saudara yang saya hormati dan cintai, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan peran kalian dalam hidup saya. Dhimaz Satya Nugraha, om yang baik hati dan penuh perhatian, Niwayan Evita Keratri, eyang yang selalu saya sayangi, Yudhanti Niwana Kiswari bude yang senantiasa saya banggakan, serta Chairunnisa Adila Zatin dan Jusuf Abdilah Rasyid sepupu yang saya cintai sepenuh hati. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kalian.

8. Sahabat-sahabat tercinta, Anisa Putri Wibowo, Vivin Dewita Sari, Tasya Devina, Delvi Isnaini, Adillah Noer Wahyuni, Afifah Dewi Nuraini, dan Citra Wardani Visi Santosa yang telah hadir dalam suka maupun duka, menjadi tempat berbagi cerita dan tawa, serta memberi semangat di saat sulit. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan.

9. Kepada Muhammad Vallendrias Arazzaq yang tak pernah lelah memberi semangat di tengah runtuhnya rasa percaya diri, yang menguatkan ketika dunia terasa begitu berat. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Ekonomi Pembangunan, atas kebersamaan, diskusi, dan bantuan yang sangat berarti selama proses akademik hingga penyusunan skripsi.

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan kalian menjadi amal jariyah.

12. Untuk diriku sendiri Nuraisya Rizali, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap air mata yang tak terlihat, setiap rasa lelah yang kau simpan dalam diam, dan untuk keputusanmu yang terus melangkah meski berkali-kali ingin menyerah. Semoga hari-hari

ke depan kau jalani dengan lebih tenang, lebih bijak, dan tetap rendah hati. Ini bukan akhir, ini adalah bukti bahwa kamu mampu melewati hal yang dulu kau kira mustahil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN iv
HALAMAN MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 9
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Sistematika Penulisan 11
BAB II PEMBAHASAN 12
2.1 Tinjauan Pustaka 12
2.2 Landasan Teori 26
2.2.1 Kemiskinan 26
2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto 32
2.2.3 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 35
2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka 37
2.2.5 Upah Minimum Kabupaten (UMK) 38
2.2.6 Dana Desa 39

2.3 Hubungan antar variabel....40
2.3.1 Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) dan Kemiskinan....41
2.3.2 Hubungan antara IPM dan Kemiskinan....42
2.3.3 Hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan....42
2.3.4 Hubungan antara Upah Minimum Kabupaten dan Kemiskinan....43
2.3.5 Hubungan antara Dana Desa dan Kemiskinan....43
2.4 Hipotesis Penelitian....44
BAB III METODE PENELITIAN....46
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data....46
3.2 Definisi Operasional Variabel....46
3.3 Metode Analisis....48
3.3.1 Common Effect Models....48
3.3.2 Fixed Effect Models....49
3.3.3 Random effect models....49
3.3.4 Uji Chow (Uji F-statistik)....49
3.3.5 Uji Hausman....49
3.3.6 Uji LM....50
3.3.7 Pengujian Hipotesis....50
BAB IV HASIL ANALISIS....53
4.1 Analisis Deskriptif Data....53
4.2 Hasil Regresi Data Panel....55
4.2.1 Pemilihan Model....56
4.2.3 Uji Chow....57
4.2.4 Uji Hausman....57
4.2.5 Uji LM....58
4.3 Model Regresi Terbaik....58
4.3.1 Koefisien Determinasi (R2)....59
4.3.2 Uji Analisis F statistik....60
4.3.3 Uji Analisis T statistik....60

4.3.4 Analisis Ekonomi....62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN....67
5.1 Simpulan....67
5.2 Implikasi....67
5.2.1 Implikasi Teoriti....67
5.2.2 Impikasi Kebijakan....68
DAFTAR PUSTAKA....70
LAMPIRAN....72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2024 2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 17
Tabel 4.1 Deskriptif Data Penelitian 53
Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel 56
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow 57
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausmant 57
Tabel 4.5 Hasil Uji LM 58
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Random Effect Models 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2019-2023.....4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data.....72
Lampiran 2. Hasil Olah Data.....76

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan struktural yang terus menjadi fokus utama pembangunan nasional, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di 29 kabupaten di Jawa Tengah selama periode 2015–2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan regresi data panel. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, yang menghasilkan bahwa model terbaik untuk digunakan adalah Random Effect Model (REM). Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM dan UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Adapun variabel PDRB dan Dana Desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan selama periode penelitian.

Kata kunci : *Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, Dana Desa, Random Effect Model, Data Panel, Jawa Tengah.*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Smith dan Todaro (2011), kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan atau kekurangan materi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi lainnya, seperti kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, dan keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi. Fenomena ini sangat kompleks, melibatkan faktor-faktor struktural yang saling berkaitan dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi semata, tetapi juga aspek sosial dan pembangunan manusia.

Kemiskinan tetap menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kehidupan jutaan penduduk terutama di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya berada dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2015, garis kemiskinan Indonesia ditetapkan sebesar Rp 356.378 per kapita per bulan (BPS, 2015). Angka ini meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 569.299 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik, 2023) yang mencerminkan adanya peningkatan taraf hidup dari masyarakat. Berdasarkan data garis kemiskinan dapat mengkategorikan jumlah penduduk miskin secara nasional. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 36,06 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 24,06 juta jiwa pada tahun 2023 yang menunjukkan angka penurunan jumlah penduduk miskinnya.

Tabel 1.1 Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2023

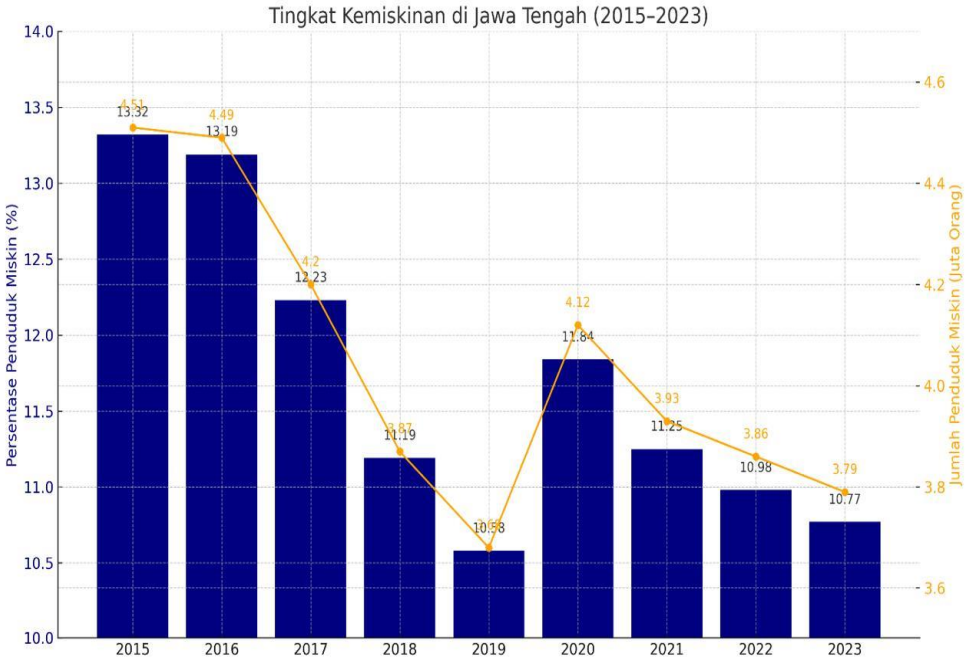
Wilayah	**Perkotaan (juta)**	**Perdesaan (juta)**	**Jumlah Penduduk Miskin (juta)**	**Proporsi Jumlah Penduduk Miskin (%)**
Sumatera	2,20	3,47	5,67	21,88
Jawa	7,85	5,77	13,62	52,56
Kalimantan	0,38	0,59	0,97	3,75
Sulawesi	0,50	1,54	2,04	7,88
Bali - Nusa Tenggara	0,65	1,44	2,09	8,07
Maluku - Papua	0,16	1,35	1,51	5,83
Indonesia	11,74	14,16	25,9	100

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (2023)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 14,16 juta jiwa (54,67%) berada di wilayah perdesaan, sedangkan 11,74 juta jiwa (45,33%) tinggal di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak terjadi di perdesaan. Pulau Jawa mencatat jumlah penduduk miskin tertinggi, baik di perkotaan maupun perdesaan, masing-

masing sebesar 7,85 juta dan 5,77 juta jiwa, dengan total 13,62 juta jiwa atau 52,56% dari total penduduk miskin nasional. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Kalimantan, dengan 0,38 juta jiwa di perkotaan dan 0,59 juta jiwa di perdesaan, total 0,97 juta jiwa atau 3,75% dari total nasional. Kontribusi penduduk miskin perkotaan tertinggi berasal dari Jawa (7,85 juta jiwa), sedangkan terendah dari Maluku-Papua (0,16 juta jiwa). Untuk perdesaan, kontribusi tertinggi juga berasal dari Jawa (5,77 juta jiwa), dan terendah dari Kalimantan (0,59 juta jiwa).

Tingkat kemiskinan, yang mengukur persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, digunakan untuk menghitung jumlah penduduk miskin. Di Pulau Jawa, rata-rata persentase penduduk miskin tahun 2023 adalah sekitar 9,6%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Jawa Tengah sebesar 10,77% dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 11,04% di tahun 2023. Di antara kedua provinsi tersebut tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi terletak di Jawa Tengah sebesar 1,1% sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 0,5%. Pada dua provinsi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan esktrem lebih tinggi provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terfokus dan efektif di wilayah tersebut. Dengan demikian kondisi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023:



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (2015)

Berdasarkan grafik tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023, terlihat bahwa persentase penduduk miskin mengalami penurunan secara konsisten dari 13,32% pada tahun 2015 menjadi 10,77% pada tahun 2023, dengan jumlah penduduk miskin menurun dari 4,49 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 3,79 juta jiwa pada tahun 2023. Penurunan ini sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, di mana persentase penduduk miskin naik menjadi 11,84% dengan jumlah penduduk miskin ini diukur melalui persentase kemiskinan, yaitu perbandingan jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk pada suatu wilayah dan periode tertentu. Data tersebut menunjukkan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah, meskipun tetap terdapat tantangan akibat faktor eksternal seperti pandemi yang dapat menyebabkan fluktuasi tingkat kemiskinan.

Selama periode 2015 hingga 2023, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami fluktuasi dengan penurunan sebesar 3,67 persen dan pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 913,37 ribu jiwa (BPS, 2023). Penurunan kemiskinan yang signifikan

terjadi pada rentang 2015 hingga 2019, yang didorong oleh pelaksanaan program Dana Desa yang mulai dijalankan sejak tahun 2015, sehingga memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 2020 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan ekonomi dan sosial secara luas. Kenaikan ini menunjukkan bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi dinamika kemiskinan meskipun terdapat upaya kebijakan yang telah berjalan sebelumnya. Pengukuran kemiskinan ini menggunakan persentase penduduk miskin terhadap total populasi sebagai indikator utama, yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah selama kurun waktu tersebut. Informasi ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang secara rutin mempublikasikan data kemiskinan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Beberapa faktor ekonomi makro diperkirakan berperan besar dalam mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah berdasarkan penyebab kemiskinan menurut Todaro dan Smith.

Pertama adalah Fasilitas dan pelayanan kesehatan kondisi nya sangat buruk dan terbatas selain itu Fasilitas pendidikan kurang memadai sehingga diperlukan peningkatan fasilitas supaya kesehatan dan pendidikan dapat meningkat sehingga SDM lebih unggul. Salah satu cara untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan dengan program Dana Desa. Dana desa merupakan salah satu Kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam hal desentralisasi fiskal, juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu instrumen penting dalam desentralisasi fiskal adalah Dana Desa, yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tingkat desa. Sejak diluncurkan tahun 2015, alokasi Dana Desa mengalami peningkatan signifikan dari Rp 20,7 triliun (2015) menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2021 yang disalurkan ke lebih dari 74 ribu desa (Kemenkeu, 2021).

Dana Desa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana setiap peningkatan 1% alokasi Dana Desa dapat

menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,058%. Dana Desa yang terlalu bergantung pada alokasi pemerintah dapat menciptakan ketergantungan jangka panjang dan menghambat pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Friedman, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa dapat menciptakan peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan, yang akhirnya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Meskipun banyak kebijakan yang telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, strategi yang lebih komprehensif dan berbasis bukti diperlukan untuk menangani kemiskinan secara lebih efektif. Desentralisasi fiskal melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan daerah serta kebijakan yang mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi lokal di Jawa Tengah menjadi langkah penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kesejahteraan yang meningkat menujukkan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan determinan penting dalam pengentasan kemiskinan. IPM mengukur capaian pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup, pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran per-kapita. Hal ini dapat memperbaiki kemampuan masyarakat dalam bekerja dan menghasilkan pendapatan (UNDP, 1990). Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang lebih baik dalam meningkatkan IPM berarti meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan (Sen, 1999). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki korelasi negatif terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi faktor penting dalam memutus rantai kemiskinan, karena hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada peningkatan kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan (Alifah, 2017).

Di sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan variabel kunci yang mempengaruhi dinamika kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menggambarkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia

dengan lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, yang pada gilirannya mengurangi daya beli dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana setiap peningkatan 1% TPT akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,006%. Penurunan TPT secara signifikan akan menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan jumlah orang yang memiliki pendapatan tetap dan akses terhadap kebutuhan dasar (Mahsunah, 2011). Fenomena ini sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan struktural. Dengan pekerjaan yang lebih baik dan lebih banyak kesempatan kerja akan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, memperbaiki standar hidup, dan mengurangi beban sosial akibat kemiskinan (Sukirno, 2006).

Kedua yaitu Tingkat pendapatan nasional cenderung rendah dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan hasil produksi ataupun pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur melalui PDRB. Salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi klasik Adam Smith, pertumbuhan output (PDRB) akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Todaro & Smith (2006) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat memperluas kesempatan ekonomi bagi kelompok miskin. Namun, penelitian di Jawa Tengah menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB dan kemiskinan tidak selalu linier, karena manfaat pertumbuhan ekonomi seringkali tidak terdistribusi merata atau tidak selalu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama oleh mereka yang berada pada lapisan masyarakat miskin (Fadillah et al., 2016).

Salah satu faktor ekonomi makro yang diduga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi regional, PDRB mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu dan sering digunakan sebagai indikator

pertumbuhan ekonomi. Secara teori, peningkatan PDRB yang signifikan diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperbaiki kualitas hidup mereka (Todaro & Smith, 2006). Dengan adanya kesempatan kerja seperti, membuka lebih banyak lapangan lapangan pekerjaan juga sangat penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan (Mankiw, 2014).

Ketiga adalah Pendapatan perkapita yang masih rendah dan pertumbuhan ekonomi nya masih lambat dan mengalami stagnasi. Upaya peningkatan yang dilakukan dapat tercermin dari hasil pendapatan di masyarakat yang dilihat pada UMK. Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting yang diterapkan pemerintah daerah dalam rangka melindungi pekerja berpenghasilan rendah dan mendukung peningkatan kesejahteraan. Di Provinsi Jawa Tengah, UMK mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2015 hingga 2023. Kenaikan ini mencerminkan respons terhadap dinamika ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan perkembangan produktivitas tenaga kerja.

Menurut data dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2023), UMK Kota Semarang sebagai yang tertinggi mencapai Rp 3.060.348 pada tahun 2023, sedangkan kabupaten Banjarnegara berada di posisi terendah dengan UMK sebesar Rp 1.958.169. Secara umum, peningkatan upah minimum di berbagai kabupaten di Jawa Tengah menggambarkan komitmen pemerintah dalam menyesuaikan standar upah dengan kondisi ekonomi lokal (Pemprov Jateng, 2023). Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menjamin kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Namun UMK tidak selalu berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan, karena di sisi lain dapat mengurangi daya serap tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Peningkatan upah minimum seharusnya mendorong daya beli dan menurunkan jumlah penduduk miskin (Octasari, 2016). Kebijakan upah minimum harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan daya saing usaha. Jika kenaikan upah tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas, maka hal ini dapat menyebabkan beban biaya tenaga kerja yang lebih tinggi bagi pelaku usaha, dan berpotensi menurunkan penyerapan tenaga kerja formal (Boediono, 1991).

Meskipun berbagai studi telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, khususnya di provinsi Jawa Tengah, pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual masih sangat diperlukan untuk memahami dinamika kompleks yang melatarbelakangi fluktuasi angka kemiskinan di wilayah ini. Tidak seperti wilayah lain yang mungkin memiliki tantangan struktural berbeda, Jawa Tengah menunjukkan karakteristik tersendiri dalam hal struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas fiskal daerah. Faktor-faktor seperti PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kebijakan Upah Minimum, dan alokasi Dana Desa terbukti saling berinteraksi dalam memengaruhi tingkat Kemiskinan, namun dengan efek yang tidak terlalu linier dan beragam.

Kondisi ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan kebijakan yang tidak hanya berbasis pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek distribusi manfaat pertumbuhan, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Keberagaman faktor penentu ini menunjukkan perlunya desain kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti, agar strategi penanggulangan kemiskinan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang menempatkan keterkaitan antara variabel-variabel ekonomi makro dan mikro dalam satu kerangka analisis yang komprehensif sangat penting, guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap realitas lokal dan dinamisnya tantangan sosial-ekonomi di tingkat daerah.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh berbagai negara, terlebih lagi negara berkembang seperti Indonesia, dimana kemiskinan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani. Dan berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dibuat maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023?

2. Bagaimana pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023?
3. Bagaimana pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023?
4. Bagaimana pengaruh antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023?
5. Bagaimana pengaruh antara Dana Desa terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Penulis berharap penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang berbagai faktor dan variasi yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, menyelesaikan penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan berharga kepada pembuat kebijakan tentang variabel yang mungkin memengaruhi tingkat kemiskinan,

memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan dan strategi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada.

3. Bagi kalangan akademik dan umum, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengetahuan, wawasan, dan referensi baru kepada pihak terkait yang akan melakukan penelitian sejenis atau ingin mengetahui lebih dalam tentang kemiskinan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang penelitian secara umum kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah penelitian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, selanjutnya berisi tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini terdiri atas kajian Pustaka yang merangkum dan membahas penelitian yang terkait dari penelitian terdahulu, lalu dilanjutkan dengan landasan teori pendukung.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri atas metode penelitian yang didalamnya berisi pengumpulan data, model penelitian, dan uji statistik.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini terdiri atas penjelasan mengenai definisi variabel, model penelitian, hasil analisis, dan pembahasan.

Bab V : Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini terdiri atas kesimpulan akhir dan implikasi yang diberikan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tujuan dari dibuatnya skripsi ini merupakan salah satu dari penyempurna beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kelebihan atau kekurangan. Selebihnya penulis mencoba menggali beberapa informasi yang bersumber dari jurnal ataupun skripsi sebelumnya untuk mengetahui teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan dalam menyusun teori ilmiah. Penulis telah mengutip referensi dan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Rachma Daniswari ini berjudul Pengaruh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Pada Tahun 2016- 2021. Penelitian menggunakan data sekunder dan menggunakan variabel independen yaitu Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Pengangguran dan variabel dependennya yaitu tingkat kemiskinan. Penelitian menggunakan analisis regresi data panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan PDRB dan Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alifah Nur Fatimah ini berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. Jenis penelitian yang digunakan berupa data sekunder menggunakan variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan variabel dependennya yaitu tingkat kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi data panel. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa variabel IPM, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun, untuk variabel Upah

Minimum Kabupaten (UMK) tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh C, Aldora Anta Fahma Putri Noreen ini berjudul Analisis Pengaruh Faktor PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2018. Jenis penelitian yang digunakan berupa data sekunder menggunakan variabel independen yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran dan variabel dependennya yaitu Tingkat Kemiskinan. Model regresi data time series yang menggunakan metode analisis Ordinary Least Squares (OLS) berfungsi sebagai instrumen analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu, Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyan Eka Setyaningsih ini berjudul Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2010-2015. Penelitian menggunakan data sekunder dan menggunakan variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan variabel dependennya yaitu Kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan dan variabel yang terakhir yaitu IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifa Nabila Zulfa ini berjudul Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2010-2022. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2010-2022 merupakan variabel dependen dengan variabel independennya yaitu Rasio PDRB Sektor Pariwisata, Upah Minimum Kabupaten (UMK), Rata-rata lama sekolah, dan Angka Harapan Hidup (AHH) dan variabel dependennya yaitu kemiskinan. Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah

analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio PDRB sektor pariwisata dan rata-rata lama sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali dan Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Munifatuzzahra ini berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2015. Jenis penelitian yang digunakan berupa data sekunder menggunakan variabel independen yaitu Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk (JP), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan variabel dependennya yaitu tingkat kemiskinan. Data tahunan dari tahun 2011 hingga 2015 digunakan dalam penelitian ini. Regresi data panel adalah metode analitis yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk (JP) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Dita Sekar Ayu ini berjudul Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2010-2015). Jenis penelitian yang digunakan berupa data sekunder menggunakan variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan variabel dependennya yaitu Kemiskinan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, sementara variabel Upah Minimum

Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Abi Pratama ini berjudul Analisis PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020. Jenis penelitian yang digunakan berupa data sekunder menggunakan variabel independen yaitu PDRB, TPT, IPM dan variabel dependennya yaitu Tingkat Kemiskinan. Penelitian dengan menggunakan metode data panel. Menurut hasil penelitian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara positif dan signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara negatif dan signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia secara negatif dan tidak signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadillah, Sukiman, dan Agustin Susyatna Dewi ini berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. Jenis penelitian yang digunakan berupa data sekunder menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Penduduk dan variabel dependennya yaitu kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan merupakan penelitian deskriptif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dan uji elastisitas regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian Pendapatan Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris ini berjudul Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat 2001-2016. Jenis penelitian yang digunakan didasarkan pada data sekunder dengan menggunakan variabel independen dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2001 hingga 2016, yang meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk Miskin. Variabel dependen adalah kemiskinan. Analisis regresi berganda dengan Ordinary Least Square (OLS) merupakan teknik analisis data yang digunakan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, dan variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Suripto dan Lalu Subayil ini berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I.Yogyakarta Periode 2010-2017. Jenis penelitian yang digunakan berupa data sekunder menggunakan variabel independen Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia dan variabel dependennya yaitu kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis data panel. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, variabel Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliza ini berjudul Pengaruh Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh yang membahas mengenai pengaruh dana desa produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2017-2019. Dengan menggunakan metode penelitian analisis regresi data panel dengan estimasi parameter model menggunakan fixed effect model. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel

Dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal tersebut terjadi karena sebagian besar dana desa lebih banyak dialokasikan untuk sektor pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan dana desa masih belum berpengaruh secara langsung terhadap pengentasan kemiskinan yang ada. Oleh karena itu, efektivitas Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan sangat tergantung pada strategi penggunaannya di masing-masing daerah.

Penelitian yang dilakukan Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, dan Ita Pingkan F.Rorong ini berjudul Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Jenis penelitian yang digunakan berupa data sekunder menggunakan variabel independennya yaitu, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan variabel dependennya yaitu, Tingkat Kemiskinan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Adinda Rachma Daniswari (2022)	Pengaruh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap	Variabel Dependen : Kemiskinan Variabel Independen : Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, dan TPT.	Regresi data panel.	Dana Desa dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan PDRB dan Tingkat Pengangguran tidak

	Kemiskinan Di Indonesia Pada Tahun 2016-2021			berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.
Alifah Nur Fatimah (2017)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.	Variabel Dependen : Kemiskinan Variabel Independen : IPM, PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).	Regresi data panel.	IPM, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan UMK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
C, Aldora Anta Fahma Putri	Analisis Pengaruh Faktor PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Tingkat	Variabel Dependen : Tingkat Kemiskinan Variabel Independen :	Ordinary Least Square (OLS).	PDRB, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh

Noreen (2020)	Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2018.	PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran.		signifikan dan negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan, Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
Dyan Eka Setyaningsih (2018)	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2010-2015.	Variabel Dependen : Kemiskinan Variabel Independen : PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, IPM.	Regresi data panel.	PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan, Jumlah Penduduk dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, Pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan,

				dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan.
Rifa Nabila Zulfa (2024)	Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2010-2022.	Variabel Dependen : Kemiskinan Variabel Independen : PDRB, Upah Minimum, Pendidikan, dan Kesehatan.	Regresi data panel.	PDRB sektor pariwisata dan rata-rata lama sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan, sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, dan Angka Harapan Hidup (AHH) Berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Munifatuzzahra (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2015.	Variabel Dependen : Kemiskinan Variabel Independen : PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, dan TPT.	Regresi data panel.	PDRB dan JP memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan variabel IPM dan TPT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Kemiskinan.
Dita Sekar Ayu (2018)	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa	Variabel Dependen : Kemiskinan Variabel Independen : PDRB, TPT, IPM, Jumlah Penduduk, dan UMK.	Regresi data panel.	PDRB, TPT, IPM, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin, sementara variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh

	Tengah (Tahun 2010-2015).			positif signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Abi Pratama (2022)	Analisis Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015- 2020.	Variabel Dependen : Tingkat Kemiskinan Variabel Independen : PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM.	Regresi data panel.	PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan, dan IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat Kemiskinan.

Nurul Fadillah, Sukiman, dan Agustin Susyatna Dewi (2016)	Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013.	Variabel Dependen : Kemiskinan Variabel Independen : Pendapatan Perkapita, Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Penduduk.	Regresi data panel.	IPM dan Pendapatan Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan.
Abdul Haris (2018)	Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat 2001- 2016.	Variabel Dependen : Kemiskinan Variabel Independen : PDRB, IPM,	Ordinary Least Square (OLS).	PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan, IPM memiliki

		dan Pengangguran.		pengaruh negatif terhadap Kemiskinan, dan Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap Kemiskinan.
Suripto dan Lalu Subayil (2020)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I.Yogyakarta Periode 2010-2017.	Variabel Dependen : Kemiskinan Variabel Independen :Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM.	Regresi data panel.	Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan, Pengangguran tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia

				memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan.
Muliza (2022)	Pengaruh Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh	Variabel Dependen : Tingkat Kemiskinan Variabel Independen : Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Regresi dan Fixed Effect Model.	Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, dan Ita Pingkan F. Rorong (2018)	Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.	Variabel Dependen : Kemiskinan Variabel Independen : Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Regresi berganda dengan data panel.	Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

2.2.1.1 Konsep Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata 'miskin' yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan, yang mencakup kebutuhan minimum 2.100 kalori per hari.

Secara umum metode pengukuran kemiskinan dikaitkan dengan tiga pendekatan, yaitu berdasarkan :

1) Garis kemiskinan pendapatan (income-based poverty line)

Pendekatan ini menggunakan konsep kemiskinan yang dikaitkan dengan garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan (income based poverty line). Mereka yang dinyatakan berada dalam kemiskinan adalah individu, rumah tangg, masyarakat atau kelompok sosial yang memperoleh pendapatan standar minimal. Salah satu contoh penggunaan konsep ini adalah penetapan batas $1 per kapita per hari sebagai indikator kemiskinan dalam Goal 1: Millenium Development Goal (United Nations, 2000).

Kelemahan Pendekatan Garis Kemiskinan Pendapatan

Pendekatan ini mengandung beberapa kelemahan, seperti: 1) pendekatan ini menyamaratakan daya beli masyarakat untuk setiap wilayah, padahal tingkat harga barang dan jasa antar negara dan antar daerah cukup berbeda, terutama antara

daerah pedesaan dan perkotaan dan antara daerah terpencil dan tidak terpencil; 2) pendapatan disini mengandung konsep statis, dimana orang yang berpendapatan dibawah $1 dikategorikan miskin, padahal orang tersebut bisa saja mengkonsumsi lebih dari $1 per hari melalui kredit atau pinjaman yang akan dilunasi dimasa yang akan datang, 3) pendapatan biasanya cenderung dilaporkan lebih rendah dalam survei, karena lupa, enggan, dan sulit diamati (terutama usaha pertanian).

2) Garis kemiskinan konsumsi (consumption-based poverty line)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam menghitung penduduk miskin di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan konsep kemiskinan yang dikaitkan kebutuhan hidup minimal yang layak untuk seseorang/rumah tangga. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun non pangan yang bersifat mendasar untuk pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Garis kemiskinan konsumsi dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita pada kelompok penduduk referensi, yaitu penduduk kelas marjinal yang hidupnya berada sedikit diatas garis kemiskinan konsumsi. Garis kemiskinan konsumsi terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan.

Batas kecukupan konsumsi makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori per kapita per hari. Sejak tahun 1993 penghitungan kecukupan kalori didasarkan pada 52 komoditi makanan terpilih yang telah disesuaikan dengan pola konsumsi, hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar tahun 1993 dan 1996. Paket komoditi makanan setelah 1996 dievaluasi perkembangannya untuk tahun-tahun setelah 1996. Batas kecukupan konsumsi non-makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi untuk memenuhi kebutuhan minimum non-makanan, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan dasar non- makanan lainnya.

3) Karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin.

Pendataan Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I

Pendekatan BKKBN dalam pengukuran kemiskinan didasarkan pada kriteria keluarga yang dibuat dalam 5 (lima) tahapan, yaitu "keluarga prasejahtera", " keluarga sejahtera tahap I", "keluarga sejahtera tahap II", "keluarga sejahtera tahap III", dan "keluarga sejahtera tahap III plus". Keluarga miskin adalah keluarga keluarga yang pada pendataan keluarga secara lengkap (sensus) adalah "keluarga prasejahtera" dan "keluarga sejahtera tahap I". Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang memenuhi lima indikator berikut:

a. anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing;
b. seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih;
c. seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja, dan bepergian;
d. bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; dan
e. bila anak sakit atau pasangan usia subur (PUS) ingin mengikuti keluarga berencana (KB) pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

"Keluarga prasejahtera" adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut.

Konsep "keluarga prasejahtera" dan "keluarga sejahtera tahap I" tersebut sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil atau keluarga inti (nuclear family). Oleh karena ukuran kemiskinan oleh BKKBN tidak begitu akurat untuk konteks daerah yang masih menganut sistim kekerabatan keluarga.

2.2.1.2 Teori Kemiskinan

Intro

Menurut Todaro dan Smith, kemiskinan adalah penduduk yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan Kesehatan yang buruk, memiliki tingkat Pendidikan yang rendah, hidup di wilayah-wilayah yang memiliki lingkungan buruk, dan memperoleh penghasilan yang rendah. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama diantaranya tingkat pendapatan nasional dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan.

Tingkat pendapatan nasional rata-rata apabila setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh suatu negara selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan pada distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas.

John Maynard Keynes (1936) mengatakan bahwa masalah kemiskinan muncul karena adanya paradoks masalah ekonomi bernama "poverty in the midst of plenty" yang artinya kemiskinan di tengah kelimpahan, dimana Keynes memungkinkan ketidakstabilan endogen dan melihat bahwa fungsi tak terkekang tenaga kerja dan pasar modal menanamkan kuat kecenderungan kliring pasar. Penekanan Keynes pada ketidakmampuan dari sistem untuk membuat penyesuaian otomatis menjadi penyebab ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan produksi permintaan masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan yang mendorong kelompok terpinggirkan (Rima, 2001).

Pada aliran Keynesian, program kesejahteraan dan Welfare State sangat mementingkan campur tangan pemerintah, hal ini dikarenakan peran pemerintah dalam mengatur serta mengarahkan kegiatan ekonomi baik dari skala kecil seperti individu- individu hingga skala menengah dan besar seperti firma-firma dalam

memberikan subsidi pendapatan untuk menunjang kesejahteraan warga negaranya terbilang cukup besar. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa aliran ini melihat kesejahteraan sebagai sebuah bentuk timbal-balik atau sebab-akibat, dimana penentangan terhadap globalisasi merupakan akibat dari adanya ketimpangan pendistribusian pendapatan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan. Hal ini berarti kesenjangan pendapatan semakin melebar sehingga menimbulkan ketimpangan standar hidup yang melahirkan kelompok terpinggirkan (negara berkembang) dan secara ekonomi akan tertindas dan bergerak menghantam arus globalisasi (Krugman, 2018).

2.2.1.3 Penyebab Kemiskinan

Menurut Todaro dan Smith faktor penyebab kemiskinan di negara berkembang dibagi menjadi enam yaitu (Todaro, M. P., & Smith, 2006):

1. Tingkat pendapatan nasional cenderung rendah dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi melambat
2. Pendapatan perkapita yang masih rendah dan pertumbuhan ekonomi nya masih lambat dan mengalami stagnasi
3. Ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata
4. Mayoritas penduduk hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan kondisi nya sangat buruk dan terbatas, kekurangan gizi dan banyak terjadinya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi sangat tinggi.
6. Fasilitas pendidikan kurang memadai dan kurikulum yang kurang relevan

Todaro. Michael dan Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta.

Menurut Bappenas (2018) terdapat beberapa penyebab kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok pandangan ekonomi politik.

   Kelompok ini berpendapat bahwa munculnya kemiskinan pedesaan merupakan hasil dari proses pengkonsentrasian kekayaan dan kekuasaan. Proses tersebut melalui tiga tingkatan, yaitu:

   a. Tingkat global,

      Munculnya kemiskinan merupakan akibat hubungan pertukaran yang eksploitatif dan tidak seimbang antara negara kaya dan negara miskin sehingga negara miskin tetap miskin, meskipun tetap memperoleh manfaat dari investasi modal

   b. Tingkat nasional,

      Kemiskinan perdesaan muncul sebagai akibat dari ulah beberapa kelompok kepentingan terutama kelompok kepentingan perkotaan, seperti kelompok berpendapatan menengah di perkotaan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan penduduk desa

   c. Tingkat local

      Kemiskinan perdesaan muncul sebagai akibat dari ulah para elit local yang terdiri dari tuan tanah, pedagang, Pelepas uang (Money leders), dan birokrat yang terus mengkonsolidasikan kekuasaan dan kekayaan mereka.

         1. Kelompok pandangan ekologi.
         2. Kelompok ini melihat kemiskinan di perdesaan sebagai akibat dari pertumbuhan dan tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya dan lingkungan. Adanya tekanan penduduk menyebabkan usaha pertanian menjadi semakin sempit. Hal ini

mengakibatkan upah riil turun dan jumlah pengangguran meningkat. Sebagai tenaga kerja terpaksa harus berimigrasi ke daerah perkotaan dan lingkungan marginal. Selain itu, para ahli ekologi fisik juga melihat karakteristik fisik dari kelompok miskin seperti kurang gizi, kondisi lingkungan yang tidak sehat, perumahaan yang kurang layak, lingkungan yang kurang nyaman, dam kondisi iklim yang tidak menentu menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan.

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto

2.2.2.1 Pengertian PDRB

Menurut Sadono Sukirno(2010), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lambat dari potensinya.

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) juga didefinisikan sebagai perluasan kegiatan ekonomi yang meningkatkan kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan, seiring waktu, meningkatkan kekayaan masyarakat adalah definisi lain dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya ekonomi di dunia nyata, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di dalam suatu wilayah seperti pertambahan

jumlah dan produksi barang-barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, perkembangan barang manufaktur, dan sebagainya.

Menurut George Mankiw(2003:522) Produk Domestik Regional Bruto adalah pendapatan total yang diperoleh secara domestik, termasuk pendapatan yang diperoleh faktor-faktor produksi yang dimiliki asing, pengeluaran total atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Atau adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian dalam kurun waktu tertentu.

2.2.2.2 Pengukuran PDRB

Terdapat cara menghitung PDRB dapat diperoleh dengan tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Produksi

   PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu:

   a. Pertanian
   b. Pertambangan dan penggalian
   c. Industri pengolahan
   d. Listrik, gas dan air bersih
   e. Bangunan
   f. Perdagangan hotel dan restoran
   g. Pengangkutan dan komunikasi
   h. Keuangan
   i. Jasa- jasa

2. Pendekatan Pendapatan

   PDRB balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu

tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB dihitung berdasarkan semua komponen dari permintaan akhir pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi swasta, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

2.2.2.3 Jenis PDRB

a. PDRB riil dan konstan (Mankiw) / Sadono

Balas jasa yang diperoleh faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah dalam bentuk upah, sewa rumah, gaji, dan keuntungan. Hitung-hitungan tersebut dihitung sebelum dipotong pajak. Selanjutnya cara penyajian PDRB dibagi dalam dua bentuk, yaitu

b. PDRB dengan dasar harga berlaku.

Nilai tambah atas produksi barang dan jasa yang dihitung menggunakan dasar harga tahun berjalan, tujuan menggunakan dasar harga tahun berjalan adalah untuk melihat kuantitas atau hasil sumber daya ekonomi di suatu wilayah.

c. PDRB dengan dasar harga konstan.

d. Nilai tambah atas produksi barang dan jasa yang dihitung melalui dasar harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, tujuan menggunakan dasar harga tahun berlaku adalah untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi tiap tahun nya.

> Menurut Badan Pusat Statistik (2020) PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. (Badan Pusat Statistik, 2020)

2.2.3 IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme), Untuk mengetahui tingkat indeks pembangunan suatu daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa faktor, yaitu umur panjang dan sehat yang ditinjau dari segi kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur kinerja pembangunan apabila dilihat dari segi pendidikan; dan kemampuan masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari segi rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Pengertian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dirilis oleh UNDP menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia.

Sejak tahun 1990 UNDP mulai melakukan penelitian pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (Human development Index) secara konsisten menerbitkan seri tahunan dalam publikasi yang berjudul Human Development Report, sebagai upaya untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia suatu Negara. Walaupun belum mampu mengukur semua aspek dari pembangunan, namun cukup mampu mengukur aspek pokok dari pembangunan manusia yang dinilai mampu menggambarkan status kemampuan dasar penduduk (UNDP, 1990).

Tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal penting yang harus diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan (UNDP, 1995). Empat hal pokok tersebut memuat pijakan-pijakan yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Produktivitas

   Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan berperan penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. sehingga pembangunan ekonomi juga dapat digolongkan dalam bagian pembangunan manusia.

2. Pemerataan

   Dalam hal mendapatkan kesempatan dan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan social, penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam hal tersebut. Oleh karena itu kegiatan yang dapat meminimalisir kesempatan untuk mendapatkan akses tersebut harus diperhatikan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dan kesempatan yang ada dan ikut berperan dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesinambungan

   Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga disiapkan untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk sumber daya baik fisik, manusia maupun lingkungan harus senantiasa diperbarui.

4. Pemberdayaan

   Dalam hal keputusan dan proses yang akan menentukan arah kehidupan mereka, penduduk harus turut berpartisipasi dan berperan penuh. Begitu pula dalam hal mengambil manfaat dari proses pembangunan penduduk juga harus dilibatkan.

   Model pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat hal tersebut diatas. Terdapat beberapa alternatif tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi dan sosial, politik sampai

kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan drajat pribadi dan jasmani hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari model tersebut.

Konsep pembangunan manusia pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Ditegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang diharapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang dapat turut berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.2.4.1 Pengertian Pengangguran

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

2.2.4.2 Pengukuran Pengangguran

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Rumus TPT

$$\text{TPT} = \frac{Jumlah\ pengangguran}{Jumlah\ angkatan\ kerja} \times 100\%$$

2.2.5 Upah Minimum Kabupaten (UMK)

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten, standar gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi ekonomi dan biaya hidup di wilayah tersebut. Penetapannya dilakukan untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di tingkat lokal. Proses penetapan UMK melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perwakilan pekerja dan pengusaha. Diskusi dan negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, biaya hidup, dan kondisi ekonomi lokal.

Upah minimum merujuk pada tingkat upah terendah yang diterapkan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan kompensasi kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau pekerjaan. Kebijakan gaji minimum di Indonesia diatur oleh peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per- 01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003. Gaji minimum mencakup bayaran bulanan terendah, termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap merujuk pada

total imbalan yang diterima oleh tenaga kerja secara teratur dan tetap, yang dapat terkait dengan kehadiran atau pencapaian prestasi tertentu.

2.2.6 Dana Desa

Penyaluran Dana Desa mula diberlakukan pada tahun 2015 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkenalkan Dana Desa sebagai Dana Transfer dari Pemerintah ke Desa melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana Desa mulai dialokasikan pada Tahun Anggaran 2015 dengan formula alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Kementerian Keuangan (2017, hal. 7) menyebutkan bahwa penyaluran Dana Desa mempunyai 5 tujuan yaitu pertama, meningkatkan pelayanan publik di desa; kedua, mengentaskan kemiskinan; ketiga, memajukan perekonomian desa; keempat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan kelima, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian salah satu tujuan penyaluran Dana Desa adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Dana Desa diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah mengalokasikan Dana Desa setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan tiga kriteria yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi formula. Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa. Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen)

dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa (bobot 10%), angka penduduk miskin desa (bobot 50%), luas wilayah desa (bobot 15%) dan tingkat kesulitan geografis desa (bobot 25%).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2024) Dana Desa merupakan alokasi dana yang diterima oleh pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditujukan khusus untuk desa. Penggunaan dana desa digunakan dengan sejumlah tujuan yang diharapkan, termasuk pendanaan operasional pemerintah, proyek pembangunan, pengembangan komunitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan adalah prinsip-prinsip yang mengatur manajemen keuangan desa, yang dilakukan secara sistematis dan teratur sesuai dengan anggaran. Peraturan Nomor 7 Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mengatur prioritas penggunaan keuangan desa. Pendanaan desa juga digunakan untuk program pembangunan desa yang sejalan dengan potensi dan karakteristik desa, serta proyek infrastruktur desa yang mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal.

Dengan demikian, penggunaan dana desa memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pelayanan kepada masyarakat desa, pendapatan desa dan masyarakat, serta mendukung program infrastruktur desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

2.3 Hubungan antar variabel

Penjelasan mengenai hubungan antara variabel dependen(Tingkat Kemiskinan) dan variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten(UMK), dan Dana Desa).

2.3.1 Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) dan Kemiskinan

Produk Domestik Regional Bruto adalah suatu metrik yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menentukan tingkat kemiskinan di negara tersebut. PDRB merupakan seluruh nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu. Apabila PDRB suatu wilayah meningkat maka akan berpengaruh pada pendapatan nasional meningkat ketika pendapatan nasional meningkat maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat karena adanya kenaikan permintaan barang serta jasa sehingga mendorong proses produksi meningkat sehingga terdapat peluang kenaikkan kesempatan kerja sehingga pendapatan di masyarakat meningkat dan diharap akan memicu berkurangnya jumlah kemiskinan.

Menurut Kuznet(1955) dalam Todaro(2006) menyatakan bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, yang dikenal sebagai kurva Kuznets "U-terbalik". Seiring waktu, distribusi pendapatan akan membaik saat sektor modern berkembang. Penelitian mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berhubungan negatif dengan Tingkat Kemiskinan, artinya peningkatan PDRB dapat mengurangi kemiskinan. Namun, ketimpangan pendapatan dapat meningkat pada tahap awal pembangunan sebelum akhirnya menurun saat pertumbuhan berlanjut.

PDRB merupakan seluruh nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu. Apabila PDRB suatu wilayah meningkat maka akan berpengaruh pada pendapatan nasional meningkat ketika pendapatan nasional meningkat maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat karena adanya kenaikan permintaan barang serta jasa sehingga mendorong proses produksi meningkat sehingga terdapat peluang kenaikkan kesempatan kerja sehingga pendapatan di masyarakat meningkat dan diharap akan memicu berkurangnya jumlah kemiskinan.

Dengan demikian, PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan berdasarkan teori Kuznet dan penelitian sejalan dengan Daniswari (2022); Fatimah (2017): Noreen (2020)

2.3.2 Hubungan antara IPM dan Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia mencakup tiga indikator untuk memenuhi standar kebutuhan hidup yakni Kesehatan, Pendidikan dan pendapatan. Semakin tinggi Pendidikan yang dicapai maka akan berpengaruh pada produktivitas dalam memperoleh pekerjaan sehingga berdampak pada pendapatan yang didapatkan. Dengan meningkatnya pendapatan maka masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup masing-masing serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Todaro(2000) menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan dapat diidentifikasi sebagai penurunan atau rendahnya tingkat pendidikan. Apabila faktor penyebab ini dapat diatasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, maka akan terjadi peningkatan pada Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan peningkatan tersebut, kualitas SDM akan lebih mampu mengikuti perkembangan industri, khususnya dalam hal penguasaan teknologi. Hal ini pada gilirannya akan membuka peluang kerja yang lebih luas, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan individu, sehingga kemiskinan dapat berkurang.

Dengan demikian, IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan berdasarkan teori Todaro dan penelitian sejalan dengan Alifah (2017), Setyaningsih (2018), dan Munifatuzzahra (2018).

2.3.3 Hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan

Menurut Sukirno (1997) dalam Choili (2014), dampak negatif dari pengangguran adalah bahwa ketidakadanya pendapatan tetap bagi individu menurunkan tingkat kemakmuran yang dicapai. Risiko seseorang untuk terjerumus ke dalam kemiskinan meningkat seiring dengan penurunan kesejahteraannya akibat pengangguran (Sukirno, 1997).

Penurunan tingkat pengangguran menunjukkan peningkatan peluang kerja yang tersedia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan bertambahnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, pendapatan individu cenderung meningkat, sehingga mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan. Hal ini berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan secara keseluruhan.

Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan berdasarkan teori Sukirno dan penelitian sejalan dengan Pratama (2022), Fadillah et al. (2016), dan Haris (2018).

2.3.4 Hubungan antara Upah Minimum Kabupaten dan Kemiskinan

Mankiw (2003) menegaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan dan pengangguran adalah upah. Selain itu, suatu unit kerja harus menerima upah, yang merupakan jenis imbalan dalam bentuk jumlah uang yang telah ditentukan yang diberikan kepada karyawan. Tingkat pengangguran akan dipengaruhi oleh penetapan tingkat upah oleh pemerintah di setiap negara atau daerah; semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil kemungkinan bahwa sedikit pekerja akan dipekerjakan di negara atau daerah tersebut (Kauffman, 1999).

Dengan demikian, Upah Minimum Kabupaten memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan berdasarkan teori Mankiw dan penelitian sejalan dengan Alifah Nur Fatimah (2017), dan Rifa Nabila Zulfa (2024).

2.3.5 Hubungan antara Dana Desa dan Kemiskinan

Dana desa diarahkan dalam pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mendorong masyarakat miskin untuk memutus roda kemiskinan. Beberapa pemanfaatan dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa. Sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan mobilitas, memberikan fasilitas munculnya prospek ekonomi baru, dan pada akhirnya nanti membantu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Menurut (Oates, 1972) dalam teori Fiscal Federalism, Dana Desa sebagai bentuk desentralisasi fiskal tidak selalu mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini terjadi karena keberhasilan Dana Desa dalam menurunkan kemiskinan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan tepat sasaran. Jika Dana Desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau belanja administrasi desa, tanpa diarahkan secara langsung pada program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat miskin, maka Dana Desa tidak akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Selain itu, menurut (Chambers, 1987) dalam teorinya tentang Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa yang efektif harus menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas diri. Jika Dana Desa hanya digunakan untuk membangun fasilitas fisik tanpa diiringi dengan pemberdayaan masyarakat, maka Dana Desa tidak akan memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dengan demikian, Dana Desa tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan berdasarkan teori Oates, Chambers dan penelitian sejalan dengan (Muliza, 2022), dan Lalira et al. (2018).

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas maka dapat diperoleh hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. H_1 : Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Dana Desa diduga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023
2. H_2 : Indeks Pembangunan Manusia(IPM) diduga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023
3. H_3 : Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023

4. H_4 : UMK diduga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023
5. H_5 : Dana Desa diduga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data sekunder digunakan dalam penyelidikan ini. Terdapat dua kategori data sekunder. Yaitu data antar tempat dan ruang *(cross-section)* yang mencakup yang mencakup 29 kabupaten di Jawa Timur dan data antar waktu *(time-series)* dengan periode tahun 2015–2023. Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, kemiskinan merupakan variabel dependen, sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), upah minimum kabupaten (UMK), produk domestik bruto regional (PDRB), dan dana desa merupakan variabel independen.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan (2) dua jenis variabel yaitu :

a. Variabel Dependen

   Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemiskinan, yaitu kondisi ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Data yang digunakan merupakan Kemiskinan dengan menggunakan data jumlah penduduk miskin pada 29 Kabupaten dengan periode waktu 2015-2023. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dengan satuan persen.

b. Variabel Independen

   i. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di suatu wilayah, atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Data yang digunakan PDRB atas dasar harga konstan pada 29 kabupaten di Jawa Tengah pada periode waktu 2015-2023. Data

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dengan satuan juta rupiah.

ii. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah atau wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Data IPM pada 29 kabupaten di Jawa Tengah pada periode waktu 2015-2023. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dengan satuan persen.

iii. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Data Tingkat Pengangguran berdasarkan pada 29 kabupaten di Jawa Tengah pada periode waktu 2015-2023. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dengan satuan persen.

iv. Variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK), adalah upah yang berlaku hanya di sebuah kabupaten . Data Upah Minimum Kabupaten (UMK)) pada 29 kabupaten di Jawa Tengah pada periode waktu 2015-2023. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dengan satuan ribu rupiah.

v. Variabel Dana Desa, adalah salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah) dan disalurkan ke rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Data Dana Desa berdasarkan pada 29 kabupaten di Jawa Tengah pada periode waktu 2015-2023. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dengan satuan ribu rupiah.

3.3 Metode Analisis

Dengan menggunakan Eviews 9 sebagai alat pengolahan data, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel. Model persamaan dapat dituliskan sebagai berikut dengan memanfaatkan regresi data panel, yang memiliki karakteristik data cross-section dan time series. Maka model persamaan dapat ditulis sebagai berikut :

Persamaan model :

$$Y_{it} = \beta_0 + Log\beta_1 X_{1it} + \beta_2(X_{2it}) + \beta_3 X_{3it} + Log\beta_4 X_{4it} + Log\beta_5 X_{5it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kemiskinan (%)

β0 = Konstanta

β1, β2, β3, β4, = Koefisien variabel independen

X1 = PDRB ADHK (Juta Rupiah)

X2 = IPM (%)

X3 = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

X4 = UMK (Rupiah)

X5 = Dana Desa (Rupiah)

e_i = standar error

i = kabupaten

t = tahun

Terlihat jelas dari rumus sebelumnya bahwa variabel dependen (Y) mempengaruhi variabel independen (X1, X2, X3, X4, X5) dalam penelitian ini.

Ada 3 (tiga) metode yang diperlukan alam proses regresi, yaitu :

3.3.1 Common Effect Models

Langkah pertama yang paling sederhana dalam proses estimasi data panel, metode *Common Effect Models* menggunakan metode *Oldinary Least Squares* (OLS) untuk menggabungkan data *time series* dan data *cross section*. Persamaan CEM diwakili dalam bentuk linier berikut ini dengan menggunakan metode ini :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

3.3.2 Fixed Effect Models

Pendekatan *Fixed Effect Model* membuat asumsi bahwa koefisien regresi tetap konstan seiring waktu dan ruang. Variabel dummy digunakan dalam *Fixed Effect Model* untuk memperhitungkan variasi dalam intersep. Ini juga dikenal sebagai *Least Squares dummy variable* (LSDV) dalam estimasi *Fixed Effect Model*. Berikut adalah bentuk linier dari persamaan FEM :

$$Y_{it=}\beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \ldots + \varepsilon_{it}$$

3.3.3 Random effect models

Residual waktu dan individu dengan intersep yang bervariasi untuk setiap subjek digunakan dalam proses estimasi. Berikut adalah bentuk linier dari persamaan *REM* :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it}$$

Pemilihan model olah data:

Sebuah uji pemilihan model diperlukan untuk memilih model terbaik yang akan digunakan dengan (3) tiga jenis estimasi yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan mempertimbangkan tiga faktor:

3.3.4 Uji Chow (Uji F-statistik)

Uji Chow yaitu metode yang digunakan untuk mempertimbangan pemilihan model antara *common effect models* atau *fixed effect models*. Dengan asumsi :

H0 : Menggunakan *Common Effect Models*

Ha : Menggunakan *Fixed Effect Models*

Metode estimasi *fixed effect models* diterapkan jika nilai *p-value* yang dihitung kurang dari 5% atau 10%. *Common effect models* digunakan dalam proses estimasi, dan nilai *p-value* lebih dari 5% atau 10% dianggap tidak signifikan.

3.3.5 Uji Hausman

Uji Hausman yaitu metode untuk memilih model antara *fixed effect models* atau *random effect models*. Dengan asumsi :

H0 :Menggunakan *Fixed Effect Models*

Ha : Menggunakan *Random Effect Models*

Metode estimasi *fixed effect models* diterapkan jika *p-value* yang dihitung kurang dari 5% atau 10%. *Random effect models* digunakan dalam proses estimasi, namun jika *p-value* lebih tinggi dari 5% atau 10%.

3.3.6 Uji Lagrange Multiplier

Uji LM yaitu metode untuk memilih model antara *common effect models* atau *random effect models*. Dengan asumsi :

H0 : Menggunakan *Common Effect Models*

Ha : Menggunakan *Random Effect Models*

Metode estimasi *random effect models* diterapkan jika nilai *p-value* yang diproyeksikan kurang dari 5% atau 10%. *Common effect models* digunakan dalam proses estimasi, tetapi jika nilai *p-value* lebih tinggi dari 5% atau 10%.

3.3.7 Pengujian Hipotesis

3.3.7.1 Koefisien Determinasi (R2)

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) akan digunakan untuk memahami pengaruh dari variabel Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, dan Dana Desa.

Jumlah varians dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model dihitung menggunakan koefisien determinasi (R^2). Rentang nilai untuk R^2 adalah $0 < R^2 < 1$. Karena R^2 lebih jelas menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan independen, R^2 yang lebih besar menunjukkan model yang berkualitas lebih tinggi (Gujarati, 2012).

3.3.7.2 Uji Analisis F statistik

Untuk menentukan apakah faktor-faktor independen memiliki dampak secara simultan terhadap variabel dependen, digunakan uji analisis statistik F. Nilai probabilitas menentukan hasil uji F. H0 ditolak jika kemungkinan <5%, yang menunjukkan bahwa variabel dependen terpengaruh jika probabilitas

>5%, H0 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel dependen tidak terpengaruh.

3.3.7.3 Uji Analisis T Statistik

Dampak parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen diteliti menggunakan analisis uji distribusi t-statistik. Dengan membandingkan nilai probabilitas dengan ambang signifikansi, temuan uji t ditentukan. Menolak H0, yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap variabel dependen, jika probabilitas >5%, dan menerima H0, yang menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen, jika probabilitas >5%.

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan
   $H_0 : \beta_0 = 0$: Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) tidak pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023
   $H_a : \beta_1 < 0$ Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023
2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan
   $H_0 : \beta_0 = 0$ Indeks Pembangunan Manusia(IPM) tidak pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023
   $H_a : \beta_1 < 0$ Indeks Pembangunan Manusia(IPM) pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023
3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan
   $H_0 : \beta_0 = 0$ Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023
   $H_a : \beta_1 > 0$ Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) pengaruh positif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023
4. Variabel Upah Minimum Kabupaten terhadap Kemiskinan
   $H_0 : \beta_0 = 0$ Upah Minimum Kabupaten(UMK) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

H_a : $\beta 1 < 0$ Upah Minimum Kabupaten(UMK) pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

5. Variabel Dana Desa terhadap Kemiskinan

   H_0 : $\beta_0 = 0$ Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

   H_a : $\beta 1 < 0$ Dana Desa pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

BAB IV
HASIL ANALISIS

4.1 Analisis Deskriptif Data

Berdasarkan analisis data panel dari data yang ditunjukkan di atas mengkaji terkait pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah selama 8 tahun dengan periode waktu 2015 hingga 2023. Dengan menggunakan data *(time series)* dengan periode waktu 2015-2023 dan data *(cross-section)* yang mencangkup 29 kabupaten di Jawa Tengah.

Variabel independen yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Dana Desa. Dengan menggunakan program pengolahan data Eviews 9, analisis data panel digunakan dalam pengolahan data. Nilai statistik *mean* atau rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi ditampilkan dalam ringkasan deskriptif berikut.

Tabel 4.1 Deskriptif Data Penelitian

	Kemiskinan (%)	PDRB (Juta Rupiah)	IPM (%)	TPT(%)	UMK (Ribu Rupiah)	Dana Desa (Rupiah)
Mean	12.35835	25794491	70.64337	4.826877	1755334.	2.32E+08
Maksimum	21.45000	3.02E+08	78.65000	9.970000	2843934.	4.96E+08
Minimum	6.610000	1142301	63.18000	1.500000	1100000.	36178610
Std.Deviasi	3.418874	24968337	3.124861	1.802515	346997.6	96617837

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2015-2023, setiap variabel dalam penelitian ini menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Pada variabel Kemiskinan, rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2015-2023 sebesar 12,36%. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 dengan angka 21,45%, sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 dengan angka 6,61%.

Pada variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), rata-rata PDRB Kabupaten di Jawa Tengah selama periode 2015-2023 sebesar 25.794.491. Nilai PDRB tertinggi terdapat di Kabupaten Cilacap pada tahun 2023 sebesar 302.000,000, sedangkan nilai PDRB terendah tercatat di Kabupaten Rembang pada tahun 2016 sebesar 1.142.301.

Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata IPM Kabupaten di Jawa Tengah selama periode 2015-2023 sebesar 70,64%. IPM tertinggi terjadi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 dengan angka 78,65%, sedangkan IPM terendah terjadi di Kabupaten Brebes pada tahun 2015 sebesar 63,18.

Pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), rata-rata tingkat pengangguran di Jawa Tengah selama periode 2015-2023 sebesar 4,83%. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Kabupaten Tegal pada tahun 2021 dengan angka 9,97%, sedangkan tingkat pengangguran terendah tercatat di Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 dengan angka 1,50%.

Pada variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK), rata-rata UMK di Jawa Tengah selama periode 2015-2023 sebesar Rp 1.755.334. UMK tertinggi tercatat di Kabupaten Kendal pada tahun 2019 sebesar Rp 2.843.934, sedangkan UMK terendah terdapat di Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 sebesar Rp 1.100.000.

Pada variabel Dana Desa, rata-rata Dana Desa yang diterima oleh setiap kabupaten di Jawa Tengah selama periode 2015-2023 sebesar Rp 232.000.000. Dana Desa tertinggi diterima oleh Kabupaten Brebes pada tahun 2020 sebesar Rp 496.000.000, sedangkan

Dana Desa terendah diterima oleh Kabupaten Kudus pada tahun 2015 sebesar Rp 36.178.610.

Secara keseluruhan, hasil deskriptif ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup besar antar kabupaten di Jawa Tengah, baik dari sisi ekonomi, pembangunan manusia, maupun ketenagakerjaan. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

4.2 Hasil Regresi Data Panel

Common Effect Model, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* adalah (3) tiga model yang membentuk teknik regresi data panel. Untuk menentukan hasil estimasi yang optimal, pengujian data panel dengan menggunakan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *LM* harus dilakukan.

Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel

Variabel	*Common Effect*		*Fixed Effect*		*Random Effect*	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
c	112.5734	0,000	81.86356	0.0000	81.00277	0.0000
LOG(PDRB)	-0.269994	0.2315	-0.015026	0.8548	-0.014314	0.8611
IPM	-0.320858	0.0000	-0.215154	0.0797	-0.280163	0.0079
Penganggura n	0.231009	0.0367	0.149308	0.0073	0.150981	0.0059
LOG(UMK)	-7.991254	0.0000	-3.665260	0.0014	-3.343042	0.0011
LOG(DANA_DESA)	2.119862	0.0000	-0.112169	0.6580	-0.070049	0.7769
R-*squared*	0.426057		0.961744		0.652923	
F-*Statistic*	37.85904 (0.000000)		172.9292 (0.000000)		95.94163 (0.000000)	
Observation	261		261		261	

4.2.1 Pemilihan Model

Regresi data panel digunakan dalam penelitian untuk memilih model regresi. Tiga teknik tersedia untuk regresi data panel, yaitu *Common Effect Models, Fixed Effect Models*, *Random effect models*. Uji Chow, uji Hausman, dan uji LM dapat digunakan untuk memilih model terbaik untuk investigasi ini.

4.2.3 Uji Chow

Bersama dengan hasil uji Chow, metode ini digunakan untuk pertimbangan pemilihan model antara *common effect* dan *fixed effect*. Berikut hasil uji Chow :

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	113.520810	(28,227)	0.0000
Cross -section Chi Square	706.845761	28	0.0000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section Chi-square 0.0000 < 0.05%, maka menolak H_0, yang menunjukkan bahwa *fixed effect models* adalah model yang tepat untuk digunakan.

4.2.4 Uji Hausman

Bersama dengan uji Hausman, metode ini digunakan untuk pertimbangan pemilihan model antara *fixed effect* dan *random effect*. Berikut hasil uji Hausmant :

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausmant

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	6.966384	5	0.2232

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0.2232 > 0.05%, maka menerima H_0 yang menunjukkan bahwa *random effect models* adalah model yang tepat untuk digunakan.

4.2.5 Uji LM

Bersama dengan uji LM, metode ini digunakan untuk pertimbangan pemilihan model antara *common effect* atau *random effect*. Berikut hasil uji LM :

Tabel 4.5 Hasil Uji LM

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	807.3521 (0.0000)	2.778346 (0.0955)	810.1304 (0.0000)
Honda	28.41394 (0.0000)	1.666837 (0.0478)	21.27032 (0.0000)
King-Wu	28.41394 (0.0000)	1.666837 (0.0478)	14.86447 (0.0000)
Standardized Honda	30.755.42 (0.0000)	2.498303 (0.0062)	19.77190 (0.0000)
Standardized King-Wu	30.75542 (0.0000)	2.498303 (0.0062)	13.46528 (0.0000)
Gourieroux, et al.	–	–	810.1304 (0.0000)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000 < alpha 5%, maka menolak H_0 yang menunjukkan bahwa *random effect models* adalah model yang tepat untuk digunakan.

4.3 Model Regresi Terbaik

Berdasarkan pengujian yang tekah dilakukan diatas model *random effect model* adalah model yang paling sesuai untuk analisis.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Random Effect Models

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.00277	5.251788	15.42385	0.0000
LOG(PDRB)	-0.014314	0.081722	-0.175159	0.8611
IPM	-0.280163	0.104608	-2.678219	0.0079
Pengangguran	0.150981	0.054427	2.774028	0.0059
LOG(UMK)	-3.343042	1.016004	-3.290381	0.0011
LOG(Dana Desa)	-0.070049	0.246939	-0.283670	0.7769
R-squared				0.652923
Adjusted R-squared				0.646118
F-statistic				95.94163
Prob(F-statistic)				0.000000

Berdasarkan tabel hasil oleh data di atas langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dampak dari variabel independent Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Kabupaten, dan Dana Desa terhadap variabel dependen kemiskinan. Evaluasi tersebut terdiri dari koefisien determinasi, uji F-statistic, dan uji t statistic.

4.3.1 Koefisien Determinasi (R2)

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk menentukan bagaimana variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah

Minimum Kabupaten (UMK), dan Dana Desa dapat menjelaskan perubahan atau variasi dalam variabel dependen yaitu kemiskinan.

Berdasarkan dari tabel, nilai R-*Square* adalah 0,652923. Ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPH), Upah Minimum di Tingkat Kabupaten (UMK), dan Dana Desa dapat menjelaskan 65,29% variasi pada tingkat kemiskinan, dengan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini menyumbang 34,71% sisanya.

4.3.2 Uji Analisis F statistik

Uji analisis F statistik guna untuk mengetahui apakah koefisien variabel regresi memiliki efek signifikan secara simultan. Tabel hasil regresi di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas (F-Statistik) adalah 0,000000 < α (5%), yang menunjukkan bahwa H0 ditolak secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum di tingkat Kabupaten (UMK), dan Dana Desa memiliki dampak terhadap kemiskinan secara bersamaan.

4.3.3 Uji Analisis T statistik

Uji analisis distribusi t statistik digunakan untuk menguji mengetahui apakah setiap variabel independen memiliki dampak pada variabel dependen. Berikut hasil uji t :

a. Variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan

$H_0 : \beta_0 = 0$ Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) tidak pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023

$H_a : \beta_1 < 0$ Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2015-2023

Variabel PDRB memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8611 > α (5% atau 10%), maka gagal menolak H_0, yang menunjukkan bahwa Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) tidak pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah antara tahun 2015 dan 2023.

b. Variabel IPM terhadap Kemiskinan

H_0 : $\beta_0 = 0$ IPM tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

H_a : $\beta_1 < 0$ IPM berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

Variabel IPM memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0079 < α (5% atau 10%) maka menolak H_0, yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar -0.280163, maka IPM berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023.

c. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan

H_0 : $\beta_0 = 0$ Pengangguran berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

H_a : $\beta_1 < 0$ Pengangguran berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

Variabel Pengangguran memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0059 < α (5%) maka menolak H_0 yang menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar 0.150981, maka Pengangguran berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023.

d. Variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Kemiskinan

H_0 : $\beta_0 = 0$ UMK tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

H_a : $\beta 1 < 0$ UMK berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

Variabel UMK memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0011 < α (5%) maka menolak H_0 yang menunjukkan bahwa UMK berpengaruh dan berdasarkan nilai koefisien sebesar -3.343042, maka UMK berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023.

e. Variabel Dana Desa terhadap Kemiskinan

H_0 : $\beta_0 = 0$ Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

H_a : $\beta_1 < 0$ Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023

Variabel Dana Desa memiliki nilai probabilitas sebesar 0.7769 > α (5%) maka gagal menolak H_0 yang menunjukkan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015-2023.

4.3.4 Analisis Ekonomi

4.3.4.1 Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan

Pada hasil penelitian di atas, variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap variabel kemiskinan, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,8611 dan nilai koefisien sebesar -0,014314. Karena hipotesis pertama tidak didukung oleh temuan penelitian ini, maka hipotesis tersebut tidak dapat terbukti.

Tidak signifikannya pengaruh PDRB terhadap kemiskinan dapat disebabkan oleh distribusi hasil pertumbuhan ekonomi yang belum merata. Peningkatan PDRB di Jawa Tengah banyak ditopang oleh sektor-sektor tertentu yang padat modal, seperti industri pengolahan, yang kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja langsung bagi kelompok miskin relatif rendah. Akibatnya, kenaikan PDRB tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi lemah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Daniswari (2022), yang menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia antara tahun 2016 dan 2021 tidak dipengaruhi oleh PDRB, dan Putri (2018), yang menemukan bahwa kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2001 dan 2016 juga tidak dipengaruhi oleh PDRB.

4.3.4.2 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Pada hasil penelitian di atas, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0079 dan nilai koefisien sebesar -0,280163, variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap variabel Kemiskinan. Dengan membuktikan nilai probabilitas sebesar 0,0079 dan nilai koefisien sebesar -0,280163, hasil penelitian dapat divalidasi karena mendukung hipotesis kedua, yang menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel Kemiskinan. Hasil penelitian tersebut sesuai hipotesis yang kedua sehingga dapat terbukti.

Hal tersebut menunjukan Indeks pembangunan manusia mencakup tiga indikator untuk memenuhi standar kebutuhan hidup yakni Kesehatan, Pendidikan, dan Pendapatan. Semakin tinggi Pendidikan yang dicapai maka akan berpengaruh pada produktivitas dalam memperoleh pekerjaan sehingga akan ada dampaknya pada pendapatan yang didapatkan. Dengan

meningkatnya pendapatan maka masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup masing-masing serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alifah Nur Fatimah, 2017) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016 dan (Dyan Eka Setyaningsih, 2018) menyatakan bahwa IPM berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015.

4.3.4.3 Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan

Pada hasil penelitian di atas, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh secara positif dan signifikan pada variabel Kemiskinan dengan nilai koefisien 0,150981 dan nilai probabilitasnya 0,0059. Hasil penelitian tersebut sesuai hipotesis yang ketiga dan dapat terbukti.

Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak orang yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap, sehingga meningkatkan jumlah individu dan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pengangguran mengurangi daya beli masyarakat, yang membatasi akses mereka terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan layanan kesehatan. Tanpa pekerjaan, individu kehilangan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja, yang menghambat mobilitas sosial dan memperpanjang siklus kemiskinan. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran dapat membebani sistem jaminan sosial dan layanan pemerintah, mengurangi kemampuan negara untuk menyediakan bantuan yang memadai bagi yang membutuhkan. Ketika banyak orang menganggur, terjadi penurunan dalam konsumsi domestik, yang dapat memperlambat

pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih sedikit peluang kerja, sehingga memperburuk masalah kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratama (2022), yang menemukan bahwa kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan dari tahun 2015 hingga 2022 dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Abdul Haris (2018), yang menemukan bahwa kemiskinan di Sumatra Barat dari tahun 2001 hingga 2016 dipengaruhi secara positif oleh Tingkat Pengangguran Terbuka.

4.3.4.4 Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan

Pada hasil penelitian di atas, variabel Upah Minimum Kabupaten berpengaruh secara signifikan dan negatif pada variabel Kemiskinan. Diketahui bahwa nilai koefisiennya adalah -3,343042 dan nilai probabilitasnya adalah 0,0011. Hasil penelitian tersebut sesuai hipotesis yang keempat sehingga dapat terbukti.

Hal tersebut menunjukan bahwa upah minimum kabupaten kemungkinan besar belum mampu mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Jika upah minimum kabupaten tetap lebih rendah daripada biaya hidup sehari-hari, maka para pekerja yang bergantung pada upah tersebut masih berada dalam kondisi sulit atau kondisi kemiskinan. Selain itu, kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya jumlah tenaga kerja atau meningkatnya biaya hidup secara keseluruhan, yang pada akhirnya justru memperparah ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rifa Nabila Zulfa, 2024) yang menyatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali 2010-2022 dan (Alifah Nur Fatimah, 2017) menyatakan bahwa Upah Minimum

Kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2012-2016.

4.3.4.5 Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan

Pada hasil penelitian di atas variabel Dana Desa tidak pengaruh terhadap variabel Kemiskinan di Jawa Tengah. Diketahui nilai probabilitas sebesar 0.7769 dan nilai koefisien sebesar -0.070049. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai hipotesis yang kelima sehingga tidak dapat terbukti.

Tidak signifikannya pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan kemungkinan terkait dengan efektivitas penggunaan dan pengelolaan anggaran. Sebagian Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan nonproduktif yang dampak ekonominya baru terasa dalam jangka panjang, sehingga belum langsung meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu, masih ada tantangan dalam perencanaan program, kapasitas aparat desa, serta pengawasan, yang membuat alokasi dana belum sepenuhnya tepat sasaran kepada kelompok miskin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muliza, 2022) yang menyatakan bahwa Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh 2017-2019 dan (Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, dan Ita Pingkan F. Rorong, 2018) menyatakan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud 2015-2017.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2015-2023, maka dapat disimpulkan:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi PDRB, semakin rendah Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah, karena pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin tinggi Tingkat Pengangguran, semakin tinggi tingkat kemiskinan, karena keterbatasan lapangan kerja menurunkan pendapatan masyarakat.
4. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kenaikan UMK mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan, meskipun perlu diimbangi dengan produktivitas tenaga kerja.
5. Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pemanfaatan Dana Desa secara efektif dan tepat sasaran mampu meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoriti

Penelitian ini mendukung teori-teori sebelumnya yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB), peningkatan kualitas sumber daya manusia (IPM),

dan kebijakan fiskal seperti Dana Desa berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini memperkuat teori Todaro dan Smith (2006) yang menekankan pentingnya pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pemerataan kesempatan kerja dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi pentingnya faktor ketenagakerjaan dan pengupahan dalam konteks kemiskinan struktural, sebagaimana disampaikan dalam teori Keynesian tentang peran pemerintah dalam mendorong lapangan kerja dan kesejahteraan.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur empiris mengenai kemiskinan di tingkat regional, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, dengan menegaskan bahwa hubungan antar variabel ekonomi makro seperti PDRB, IPM, TPT, UMK, dan Dana Desa terhadap kemiskinan tidak selalu bersifat linier, tetapi saling mempengaruhi dalam konteks sosial-ekonomi lokal.

5.2.2 Impikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, yaitu:

1. Penguatan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berbasis pada sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan, seperti pertanian, industri kecil, dan sektor pariwisata lokal.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah harus fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan untuk meningkatkan IPM, yang terbukti mampu menurunkan kemiskinan dalam jangka panjang.
3. Perluasan Lapangan Kerja: Diperlukan penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi dan pelatihan keterampilan, khususnya di sektor padat karya, agar tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan.
4. Kebijakan Pengupahan yang Seimbang: Pemerintah daerah harus mengatur UMK yang realistis, yang mampu meningkatkan kesejahteraan

pekerja tanpa membebani pengusaha, dengan tetap memperhatikan daya saing dan produktivitas tenaga kerja.

5. Optimalisasi Dana Desa: Penggunaan Dana Desa harus diarahkan untuk membiayai program-program produktif seperti pengembangan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur dasar, dan pelatihan keterampilan masyarakat desa, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.
6. Pengawasan dan Evaluasi Program: Pemerintah perlu meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan agar alokasi anggaran seperti Dana Desa tidak disalahgunakan dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Alifah, N. F. (2017). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 [].* Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang.

BPS. (2015). *Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, 2023 - Tabel Statistik*. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZG1oc2JVcHZhVkpSVDFscmQxTTVTMWxqT1hwMFVUMDkjMw==/garis-kemiskinan--jumlah--dan-persentase-penduduk-miskin--2015.html?year=2015

BPS. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah - Tabel Statistik*. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg1IzI=/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html

Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. LP3ES.

Daniswari, A. R. (2022). *Pengaruh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016–2021*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Fadillah, N., Dewi, A. S., & Sukiman, S. (2016). Analisis pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, IPM dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009-2013. *Eko-Regional*, *11*(1), 266531.

Fatimah, A. N. (2017). *Pengaruh IPM, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang

Friedman, J. (2002). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell.

Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika (5th ed.)*. Salemba Empat.

Kemenkeu. (2021). *Kebijakan Dana Desa Tahun 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf

Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *18*(4), 62–72. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/20951/20638

Mahsunah. (2011). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *2*(1), 45–60.

Mankiw, N. G. (2014). *Principles of Economics (7th ed.)*. Cengage Learning.

Muliza. (2022). *Pengaruh Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh*. Skripsi Sarjana, Universitas Syiah Kuala

Munifatuzzahra. (2018). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011–2015*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Noreen, C. A. F. P. (2020). *Analisis Pengaruh Faktor PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002–2018*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace.

Pratama, A. (2022). *Analisis PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015–2020*. Skripsi, Universitas Sriwijaya.

Putri, D. S. A. (2018). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010–2015*. Skripsi, Universitas Diponegoro.

Rima, I. H. (2001). *Development and Growth in the Malaysian Economy*. Praeger.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Setyaningsih, D. E. (2018). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan IPM terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2010–2015*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Smith, S. C., & Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi ke-9)*. Erlangga.

Smith, S. C., & Todaro, M. P. (2011). *Economic Development (11th ed.)*. Pearson Education.

Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana.

Suripto, & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010–2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *20*(1), 55–66.

UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*. United Nations Development Programme.

United Nations. (2000). *Millennium Development Goals*. United Nations. https://www.un.org

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data

Kabupaten	Tahun	Kemiskinan (%)	UMK (Rp)	Dana Desa (Rp)	PDRB ADKH	IPM (%)	Pengangguran (%)
Kab. Cilacap	2015	14,39	1.195.667	81060083	88357606,68	67,77	8,01
Kab. Cilacap	2016	14,12	1.527.000	181985398	92858649,84	68,60	7,155
Kab. Cilacap	2017	13,94	1.693.689	232084054	95254586,70	68,90	6,3
Kab. Cilacap	2018	11,25	1.841.209	240787259	98100568,17	69,56	7,49
Kab. Cilacap	2019	10,73	1.989.058	287722232	100327298,90	69,98	7,24
Kab. Cilacap	2020	11,46	2.158.327	296800979	90011584,10	69,95	9,1
Kab. Cilacap	2021	11,67	2.228.904	299567198	91944587,54	70,42	9,97
Kab. Cilacap	2022	11,02	2.230.731	309114066	96677843,01	70,99	9,62
Kab. Cilacap	2023	10,99	2.383.090	321870697	101839740,58	71,83	8,74
Kab. Banyumas	2015	17,52	1.100.000	89291645	31164876,40	69,89	6,37
Kab. Banyumas	2016	17,23	1.350.000	200450575	33051046,65	70,49	5,495
Kab. Banyumas	2017	17,05	1.461.400	255734553	35147313,30	70,75	4,62
Kab. Banyumas	2018	13,50	1.589.000	295876047	37414500,58	71,30	4,15
Kab. Banyumas	2019	12,53	1.750.000	360743521	39779320,86	71,96	4,17
Kab. Banyumas	2020	13,26	1.900.000	381798090	3921623,57	71,98	6
Kab. Banyumas	2021	13,66	1.970.000	381247099	40686808,02	72,44	6,05
Kab. Banyumas	2022	12,84	1.983.261	383196882	43069504,38	73,17	6,05
Kab. Banyumas	2023	12,53	2.118.124	346592982	45396301,96	73,86	6,35
Kab. Purbalingga	2015	19,70	1.101.600	66606973	14130612,26	67,03	4,84
Kab. Purbalingga	2016	18,98	1.377.500	149527020	14816429,63	67,48	5,085
Kab. Purbalingga	2017	18,80	1.522.500	191224910	15612285,90	67,72	5,33
Kab. Purbalingga	2018	15,62	1.655.200	199934262	16458708,49	68,41	6,02
Kab. Purbalingga	2019	15,03	1.788.500	237221605	17387610,58	68,99	4,73
Kab. Purbalingga	2020	15,90	1.940.800	248095972	17182873,71	68,97	6,1
Kab. Purbalingga	2021	16,24	1.988.000	246883340	17731438,00	69,15	6,05
Kab. Purbalingga	2022	15,30	1.996.814	247368204	18690729,01	69,54	5,23
Kab. Purbalingga	2023	14,99	2.130.981	248274033	19533863,81	70,24	5,61
Kab. Banjarnegara	2015	18,37	1.112.500	74810054	12266046,35	64,73	5,05
Kab. Banjarnegara	2016	17,46	1.265.000	167884303	12932884,85	65,52	4,885
Kab. Banjarnegara	2017	17,21	1.370.000	214470940	13663266,65	65,86	4,72
Kab. Banjarnegara	2018	15,46	1.490.000	222775782	14438149,74	66,54	3,99
Kab. Banjarnegara	2019	14,76	1.610.000	262654461	15246865,65	67,34	4,44
Kab. Banjarnegara	2020	15,64	1.748.000	268003259	15045884,99	67,45	5,86
Kab. Banjarnegara	2021	16,23	1.805.000	265745328	15536477,91	67,86	5,86
Kab. Banjarnegara	2022	15,20	1.819.835	266535723	16359106,40	68,61	6,38
Kab. Banjarnegara	2023	14,90	1.958.170	277886659	1717345,162	69,14	6,26
Kab. Kebumen	2015	20,44	1.165.000	1,26E+08	16115554,01	66,87	4,14
Kab. Kebumen	2016	19,86	1.300.000	282401546	16923719,54	67,41	4,86
Kab. Kebumen	2017	19,60	1.445.000	359998061	17794789,30	68,29	5,58
Kab. Kebumen	2018	17,47	1.573.000	350691179	18778048,50	68,80	5,48
Kab. Kebumen	2019	16,82	1.700.000	396569628	19815062,62	69,60	4,69
Kab. Kebumen	2020	17,59	1.845.000	409878212	19527664,95	69,81	6,07
Kab. Kebumen	2021	17,83	1.905.400	405260453	20253059,43	70,05	6,03
Kab. Kebumen	2022	16,41	1.911.850	416756373	21425793,42	70,79	5,92
Kab. Kebumen	2023	16,34	2.043.902	444275016	22638895,33	71,37	5,11
Kab. Purworejo	2015	14,27	1.157.500	124419463	10862645,98	70,37	4,01
Kab. Purworejo	2016	13,91	1.324.600	279101050	11421552,22	70,66	3,825
Kab. Purworejo	2017	13,81	1.433.900	355968664	1202378,044	71,31	3,64
Kab. Purworejo	2018	11,67	1.560.000	326085184	1266497,605	71,87	4,43
Kab. Purworejo	2019	11,45	1.686.000	369061708	13353336,33	72,50	2,91
Kab. Purworejo	2020	11,78	1.835.000	369061708	13138294,11	72,68	4,04
Kab. Purworejo	2021	12,40	1.895.000	363993225	13573469,54	72,98	3,59
Kab. Purworejo	2022	11,53	1.906.781	346454872	1430055,684	73,60	4,45
Kab. Purworejo	2023	11,33	2.035.890	371833451	15025908,55	74,28	4,02
Kab. Wonosobo	2015	21,45	1.166.000	66862280	11334080,04	65,70	4,47
Kab. Wonosobo	2016	20,53	1.326.000	150053469	11941198,92	66,19	4,325
Kab. Wonosobo	2017	20,32	1.457.100	191496626	12436048,84	66,89	4,18
Kab. Wonosobo	2018	17,58	1.585.000	184414648	1306584,164	67,81	3,5
Kab. Wonosobo	2019	16,63	1.712.500	212114096	13793040,27	68,27	3,43
Kab. Wonosobo	2020	17,36	1.859.000	219777303	13566176,25	68,22	5,37
Kab. Wonosobo	2021	17,67	1.920.000	218728665	14064764,70	68,43	5,26
Kab. Wonosobo	2022	16,17	1.931.285	221885021	14770503,78	68,69	5,01
Kab. Wonosobo	2023	15,58	2.076.209	241533073	15405984,62	69,37	4,95
Kab. Magelang	2015	13,07	1.255.000	101155122	18864651,97	67,13	5,16
Kab. Magelang	2016	12,67	1.410.000	226980301	19882244,24	67,85	3,8
Kab. Magelang	2017	12,42	1.570.000	289613899	2097480,101	68,39	2,44
Kab. Magelang	2018	11,23	1.742.000	325360832	22082795,90	69,11	2,89
Kab. Magelang	2019	10,67	1.822.000	383071777	23253154,32	69,87	3,07
Kab. Magelang	2020	11,27	2.042.200	395010278	22865151,84	69,87	4,27
Kab. Magelang	2021	11,91	2.075.000	391044109	23661713,24	70,12	5,03
Kab. Magelang	2022	11,09	2.081.807	393231309	24953184,97	70,85	4,97
Kab. Magelang	2023	10,96	2.236.777	355843704	26211563,24	71,45	4,42

Kab. Boyolali	2015	12,45	1.197.800	72548977	18170383,95	71,74	2,03
Kab. Boyolali	2016	12,09	1.403.500	162801074	19139359,22	72,18	2,85
Kab. Boyolali	2017	11,96	1.519.289	207823645	20248849,44	72,64	3,67
Kab. Boyolali	2018	10,04	1.651.650	192998474	21406268,93	73,22	2,18
Kab. Boyolali	2019	9,53	1.790.000	219802085	22681097,81	73,80	3,09
Kab. Boyolali	2020	10,18	1.942.500	219802085	22409732,64	74,25	5,28
Kab. Boyolali	2021	10,62	2.000.000	216981458	23447366,01	74,40	5,09
Kab. Boyolali	2022	9,82	2.010.299	223033286	24931304,74	74,97	4,92
Kab. Boyolali	2023	9,81	2.155.712	258860591	26334296,33	75,41	4,05
Kab. Klaten	2015	14,89	1.170.000	108674969	22558976,15	73,81	2,51
Kab. Klaten	2016	14,46	1.400.000	243866425	23725740,98	73,97	3,43
Kab. Klaten	2017	14,15	1.528.500	311087447	2499310,327	74,25	4,35
Kab. Klaten	2018	12,96	1.661.632	320940593	26360649,93	74,79	3,14
Kab. Klaten	2019	12,28	1.795.061	374660994	27805993,69	75,29	3,54
Kab. Klaten	2020	12,89	1.947.821	385072138	27480359,39	75,56	5,46
Kab. Klaten	2021	13,49	2.011.515	380846601	28531108,64	76,12	5,48
Kab. Klaten	2022	12,33	2.015.623	379432533	302149981,96	76,95	4,31
Kab. Klaten	2023	12,28	2.152.323	369793696	31938326,59	77,59	4,2
Kab. Sukoharjo	2015	9,26	1.223.000	43045054	21612078,19	74,53	4,52
Kab. Sukoharjo	2016	9,07	1.396.000	96619355	22847982,81	75,06	3,395
Kab. Sukoharjo	2017	8,75	1.513.000	123576433	2416393,948	75,56	2,27
Kab. Sukoharjo	2018	7,41	1.648.000	126076256	2556406,509	76,07	2,72
Kab. Sukoharjo	2019	7,14	1.783.500	146662487	27076442,63	76,84	3,39
Kab. Sukoharjo	2020	7,68	1.938.000	146662487	26616503,11	76,98	6,93
Kab. Sukoharjo	2021	8,23	1.986.450	148043106	27634117,53	77,13	3,32
Kab. Sukoharjo	2022	7,61	1.998.153	148559522	29185353,81	77,94	2,47
Kab. Sukoharjo	2023	7,58	2.138.248	156983503	30661916,76	78,65	3,4
Kab. Wonogiri	2015	12,98	1.101.000	69330086	16977198,56	67,76	3,07
Kab. Wonogiri	2016	13,12	1.293.000	155565696	17869145,42	68,23	2,725
Kab. Wonogiri	2017	12,90	1.401.000	198745821	18818939,39	68,66	2,38
Kab. Wonogiri	2018	10,75	1.542.000	196188133	19837022,48	69,37	2,28
Kab. Wonogiri	2019	10,25	1.655.000	227393914	20856209,49	69,98	2,55
Kab. Wonogiri	2020	10,86	1.797.000	227393914	20563144,42	70,25	4,27
Kab. Wonogiri	2021	11,55	1.827.000	224681357	21251165,24	70,49	2,43
Kab. Wonogiri	2022	10,99	1.839.043	213561759	22448630,49	71,04	1,95
Kab. Wonogiri	2023	10,94	1.968.448	252712712	23566879,01	71,97	1,92
Kab. Karanganyar	2015	12,46	1.226.000	46196873	21286287,14	74,26	3,6
Kab. Karanganyar	2016	12,49	1.420.000	103686344	22436293,80	74,90	3,385
Kab. Karanganyar	2017	12,28	1.560.000	133065748	23731952,05	75,22	3,17
Kab. Karanganyar	2018	10,01	1.696.000	138839437	2515027,773	75,54	2,28
Kab. Karanganyar	2019	9,55	1.833.000	160000995	26599744,09	75,89	3,12
Kab. Karanganyar	2020	10,28	1.989.000	167891190	26103228,36	75,86	5,96
Kab. Karanganyar	2021	10,68	2.054.040	169314064	27039607,96	75,99	5,89
Kab. Karanganyar	2022	9,85	2.064.313	169874596	28624989,89	76,58	5,7
Kab. Karanganyar	2023	9,79	2.207.484	175562791	30308236,04	77,31	4,35
Kab. Sragen	2015	14,86	1.105.000	56174163	21390871,20	71,10	4,51
Kab. Sragen	2016	14,38	1.300.000	126080582	22625821,66	71,43	4,67
Kab. Sragen	2017	14,02	1.422.585	160952196	23977207,30	72,40	4,55
Kab. Sragen	2018	13,12	1.546.492	146148323	25356459,51	72,96	4,83
Kab. Sragen	2019	12,79	1.673.500	158044095	26853059,12	73,43	3,32
Kab. Sragen	2020	13,38	1.815.914	173221301	26367261,24	73,95	4,75
Kab. Sragen	2021	13,83	1.829.500	175365649	27355145,96	74,08	4,76
Kab. Sragen	2022	12,94	1.839.429	182671645	28929808,57	74,65	4,69
Kab. Sragen	2023	12,87	1.969.569	208127799	30442192,81	75,10	3,87
Kab. Grobogan	2015	13,68	1.160.000	80175760	15962619,43	68,05	5,22
Kab. Grobogan	2016	13,57	1.305.000	179971455	16682629,70	68,52	4,12
Kab. Grobogan	2017	13,27	1.435.000	229625434	17659254,29	68,87	3,02
Kab. Grobogan	2018	12,31	1.560.000	248195231	18688571,17	69,32	2,22
Kab. Grobogan	2019	11,77	1.685.500	289687819	19692631,32	69,86	3,54
Kab. Grobogan	2020	12,46	1.830.000	304990065	19383027,40	69,87	4,5
Kab. Grobogan	2021	12,74	1.890.000	303339252	20115533,52	70,41	4,38
Kab. Grobogan	2022	11,80	1.894.032	307655887	21218155,49	70,97	4,4
Kab. Grobogan	2023	11,72	2.029.569	304184399	22380303,89	71,49	4,02
Kab. Blora	2015	13,52	1.180.000	74816870	12882587,70	66,22	4,68
Kab. Blora	2016	13,33	1.328.500	167873329	15914663,42	66,61	3,765
Kab. Blora	2017	13,04	1.438.100	214102024	16866640,78	67,52	2,85
Kab. Blora	2018	11,90	1.564.000	229733837	17605216,00	67,95	3,3
Kab. Blora	2019	11,32	1.690.000	268253846	18318415,14	68,65	3,83
Kab. Blora	2020	11,96	1.834.000	270000037	17483886,74	68,84	4,89
Kab. Blora	2021	12,39	1.894.000	267071340	18126446,90	69,37	3,81
Kab. Blora	2022	11,53	1.904.196	265277093	18608610,39	69,95	3,7
Kab. Blora	2023	11,49	2.040.080	258020113	19184918,86	70,63	3,1
Kab. Rembang	2015	19,28	1.120.000	79709975	10850269,20	68,18	4,51
Kab. Rembang	2016	18,54	1.300.000	178863338	1142300,830	68,60	3,85
Kab. Rembang	2017	18,35	1.408.000	228013715	1222017,217	68,95	3,19
Kab. Rembang	2018	15,41	1.535.000	229010130	12939682,29	69,46	2,83
Kab. Rembang	2019	14,95	1.660.000	258436412	13612335,31	70,15	3,6
Kab. Rembang	2020	15,60	1.802.000	263625423	13409631,20	70,02	4,83
Kab. Rembang	2021	15,80	1.861.000	260523814	13925516,24	70,43	3,67
Kab. Rembang	2022	14,65	1.874.322	252064026	14698843,95	71,00	1,76

Kab. Rembang	2023	14,17	2.015.927	240767753	15463552,73	71,89	2,6
Kab. Pati	2015	11,95	1.176.500	110946620	24770325,07	68,51	4,43
Kab. Pati	2016	11,65	1.310.000	248952687	26130205,34	69,03	3,735
Kab. Pati	2017	11,38	1.420.500	317453410	27612445,94	70,12	3,83
Kab. Pati	2018	9,90	1.585.000	365454541	29189879,34	70,71	3,57
Kab. Pati	2019	9,46	1.742.000	417038558	30885378,59	71,35	3,64
Kab. Pati	2020	10,08	1.891.000	430714441	30527473,16	71,77	4,74
Kab. Pati	2021	10,21	1.953.000	426380834	31559078,68	72,28	4,6
Kab. Pati	2022	9,33	1.968.339	427096131	33312381,30	73,14	4,45
Kab. Pati	2023	9,31	2.107.697	372985244	34984662,83	73,59	4,29
Kab. Kudus	2015	7,73	1.380.000	36178610	65029937,50	72,72	5,04
Kab. Kudus	2016	7,65	1.608.200	81222147	66679583,36	72,94	4,3
Kab. Kudus	2017	7,59	1.740.900	103687281	68821162,19	73,84	3,56
Kab. Kudus	2018	6,98	1.892.500	117966044	71048973,31	74,58	3,28
Kab. Kudus	2019	6,68	2.044.467	139077753	73241777,45	74,94	3,8
Kab. Kudus	2020	7,31	2.218.451	149152722	70964725,44	75,00	5,53
Kab. Kudus	2021	7,60	2.290.995	151169588	69872178,14	75,16	3,77
Kab. Kudus	2022	7,41	2.293.058	146122990	71416927,09	75,89	3,21
Kab. Kudus	2023	7,24	2.439.814	133255036	72984396,76	76,71	3,25
Kab. Jepara	2015	8,50	1.150.000	55540072	17210365,92	70,02	3,12
Kab. Jepara	2016	8,35	1.350.000	124699832	18080634,88	70,25	3,98
Kab. Jepara	2017	8,12	1.600.000	158765096	19055335,81	70,79	4,84
Kab. Jepara	2018	7,00	1.739.360	190273424	20170255,17	71,38	3,75
Kab. Jepara	2019	6,66	1.879.031	234090663	2138428,293	71,88	2,92
Kab. Jepara	2020	7,17	2.040.000	249106533	20973089,31	71,99	6,7
Kab. Jepara	2021	7,44	2.107.000	250171633	21944232,37	72,36	4,23
Kab. Jepara	2022	6,88	2.108.403	245689231	2324985,294	73,15	4,1
Kab. Jepara	2023	6,61	2.272.627	207388977	24451039,80	73,85	3,35
Kab. Demak	2015	14,44	1.535.000	73852473	14912999,60	69,75	6,02
Kab. Demak	2016	14,10	1.745.000	165814611	15672482,50	70,10	5,245
Kab. Demak	2017	13,41	1.900.000	211595493	16584124,32	70,41	4,47
Kab. Demak	2018	12,54	2.065.490	229565688	17479877,38	71,26	7,03
Kab. Demak	2019	11,86	2.240.000	276950857	18417009,99	71,87	5,42
Kab. Demak	2020	12,54	2.432.000	287089488	18374561,64	72,22	7,31
Kab. Demak	2021	12,92	2.511.526	284463387	18856415,63	72,57	5,28
Kab. Demak	2022	12,09	2.513.005	280456401	19846430,87	73,36	6,11
Kab. Demak	2023	12,01	2.680.421	255703420	20839746,27	74,07	5,38
Kab. Semarang	2015	8,15	1.419.000	57840951	28768327,30	71,89	2,57
Kab. Semarang	2016	7,99	1.610.000	129797974	30292468,04	72,40	2,175
Kab. Semarang	2017	7,78	1.745.000	165688573	32002984,00	73,20	1,78
Kab. Semarang	2018	7,29	1.900.000	157084768	33817679,34	73,61	2,25
Kab. Semarang	2019	7,04	2.055.000	181931854	35638961,98	74,14	2,54
Kab. Semarang	2020	7,51	2.229.880	186914532	34688037,34	74,10	4,57
Kab. Semarang	2021	7,82	2.302.798	188339520	35948862,04	74,24	5,02
Kab. Semarang	2022	7,27	2.311.254	190973161	37857918,70	74,67	4,81
Kab. Semarang	2023	7,17	2.480.988	200079055	39651856,25	75,13	4,05
Kab. Temanggung	2015	11,76	1.178.000	72423652	12489394,54	67,07	1,5
Kab. Temanggung	2016	11,60	1.313.000	162495600	13116363,64	67,60	2,235
Kab. Temanggung	2017	11,46	1.431.500	207451723	13776254,81	68,34	2,97
Kab. Temanggung	2018	9,87	1.557.000	213042611	14483355,21	68,83	3,23
Kab. Temanggung	2019	9,42	1.682.027	241944648	15214058,87	69,56	2,98
Kab. Temanggung	2020	9,96	1.825.200	250756487	14890755,46	69,57	3,85
Kab. Temanggung	2021	10,17	1.885.000	247881825	15387930,44	69,88	2,62
Kab. Temanggung	2022	9,33	1.887.832	245879771	16187374,83	70,77	2,54
Kab. Temanggung	2023	9,26	2.027.569	235340840	16997526,82	71,33	2,32
Kab. Kendal	2015	11,62	1.383.450	74239102	24762325,36	69,57	7,07
Kab. Kendal	2016	11,37	1.639.600	166595736	2613941,495	70,11	6
Kab. Kendal	2017	11,10	1.774.867	212767778	27649777,07	70,62	4,93
Kab. Kendal	2018	9,84	1.929.458	215090043	29245664,52	71,28	6,02
Kab. Kendal	2019	9,41	2.843.934	240437047	30916386,47	71,97	6,26
Kab. Kendal	2020	9,99	2.261.775	251320499	30449024,40	72,29	7,56
Kab. Kendal	2021	10,24	2.335.735	251060030	31632276,02	72,50	7,55
Kab. Kendal	2022	9,48	2.340.312	255193805	33428957,44	73,19	7,34
Kab. Kendal	2023	9,39	2.508.300	254567478	35286233,79	73,86	5,76
Kab. Batang	2015	11,27	1.270.000	66579163	1232823,923	65,46	4,56
Kab. Batang	2016	11,04	1.467.500	149403922	12948191,13	66,38	5,19
Kab. Batang	2017	10,80	1.603.000	190962224	13667079,90	67,35	5,82
Kab. Batang	2018	8,69	1.749.900	168403538	14448625,81	67,86	4,2
Kab. Batang	2019	8,35	1.900.000	192327469	15226786,53	68,42	4,11
Kab. Batang	2020	9,13	2.061.700	195614218	15031083,84	68,65	6,92
Kab. Batang	2021	9,68	2.129.117	195721522	15764265,54	68,92	6,59
Kab. Batang	2022	8,98	2.135.535	200193418	16704986,75	69,45	6,64
Kab. Batang	2023	8,92	2.282.026	216576622	17629389,28	70,20	6,06
Kab. Pekalongan	2015	12,84	1.271.000	77762725	13234564,04	67,40	5,1
Kab. Pekalongan	2016	12,90	1.463.000	174527576	13921651,83	67,71	4,745
Kab. Pekalongan	2017	12,61	1.583.697	222535590	14679128,72	68,40	4,39
Kab. Pekalongan	2018	10,06	1.721.637	227842747	15525050,94	68,97	4,36
Kab. Pekalongan	2019	9,71	1.859.885	259749216	16356350,99	69,71	4,35
Kab. Pekalongan	2020	10,19	2.018.161	266336610	16047511,77	69,63	6,97
Kab. Pekalongan	2021	10,57	2.084.155	263397106	16615065,65	70,11	4,28

Kab. Pekalongan	2022	9,67	2.094.646	263868873	17463415,80	70,81	3,23
Kab. Pekalongan	2023	9,67	2.247.346	257679902	18361079,36	71,40	3,25
Kab. Pemalang	2015	18,30	1.193.400	66619532	14673696,23	63,70	6,53
Kab. Pemalang	2016	17,58	1.325.000	149607350	15469800,59	64,17	6,06
Kab. Pemalang	2017	17,37	1.460.000	191002083	16336984,400	65,04	5,59
Kab. Pemalang	2018	16,04	1.588.000	249322556	17265888,82	65,67	6,17
Kab. Pemalang	2019	15,41	1.718.000	301814036	18267199,78	66,32	6,45
Kab. Pemalang	2020	16,02	1.865.000	329535761	18155597,42	66,32	7,64
Kab. Pemalang	2021	16,56	1.926.000	328015879	18933194,65	66,56	6,71
Kab. Pemalang	2022	15,06	1.940.890	320431408	19895235,20	67,19	6,63
Kab. Pemalang	2023	15,03	2.081.783	255237209	20719581,53	68,03	6,55
Kab. Tegal	2015	10,09	1.155.000	81620159	19999475,45	65,04	9,52
Kab. Tegal	2016	10,10	1.373.000	183211736	21182917,23	65,84	8,425
Kab. Tegal	2017	9,90	1.478.000	234026299	22322100,13	66,44	7,33
Kab. Tegal	2018	7,94	1.617.000	282703163	23552548,37	67,33	8,24
Kab. Tegal	2019	7,64	1.747.000	340958369	24861495,83	68,24	8,12
Kab. Tegal	2020	8,14	1.896.000	361348720	24492624,83	68,39	9,82
Kab. Tegal	2021	8,60	1.958.000	359453876	25401911,06	68,79	9,97
Kab. Tegal	2022	7,90	1.968.446	359781317	26705267,25	69,53	9,64
Kab. Tegal	2023	7,30	2.106.238	300740717	28023033,89	70,23	8,6
Kab. Brebes	2015	19,79	1.166.550	94563325	26572834,89	63,18	6,49
Kab. Brebes	2016	19,47	1.310.000	212385910	27930986,28	63,98	7,265
Kab. Brebes	2017	19,14	1.418.100	270922338	29509206,81	64,86	8,04
Kab. Brebes	2018	17,17	1.542.000	344197496	31060106,12	65,68	7,2
Kab. Brebes	2019	16,22	1.665.850	441009459	32847862,67	66,12	7,39
Kab. Brebes	2020	17,03	1.807.614	495634148	32693080,65	66,11	9,83
Kab. Brebes	2021	17,43	1.866.723	492478504	33533328,43	66,32	9,78
Kab. Brebes	2022	16,05	1.885.019	453819700	35414209,35	67,03	9,48
Kab. Brebes	2023	15,78	2.018.837	328233319	36739154,44	67,95	8,98

Lampiran 2. Hasil Olah Data

Variabel Dependen : Tingkat Kemiskinan (%)

Variabel Independen :

X1= PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) (juta rupiah)

X2= IPM (%)

X3= Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

X4= UMK (rupiah)

X5= Dana Desa (rupiah)

a. Hasil Estimasi Common Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 10/12/24 Time: 11:22
Sample: 2015 2023
Periods included: 9
Cross-sections included: 29
Total panel (balanced) observations: 261

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	112.5734	12.24278	9.195085	0.0000
LOG(UMK)	-7.991254	1.289193	-6.198648	0.0000
LOG(DANA_DESA)	2.119862	0.432877	4.897151	0.0000
LOG(PDRB)	-0.269994	0.225109	-1.199392	0.2315
IPM	-0.320858	0.073600	-4.359461	0.0000
PENGANGGURAN	0.231009	0.109985	2.100377	0.0367

R-squared	0.426057	Mean dependent var	12.35835
Adjusted R-squared	0.414803	S.D. dependent var	3.418874
S.E. of regression	2.615375	Akaike info criterion	4.783412
Sum squared resid	1744.248	Schwarz criterion	4.865355
Log likelihood	-618.2353	Hannan-Quinn criter.	4.816351
F-statistic	37.85904	Durbin-Watson stat	0.107322
Prob(F-statistic)	0.000000		

b. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 10/12/24 Time: 11:24
Sample: 2015 2023
Periods included: 9
Cross-sections included: 29
Total panel (balanced) observations: 261

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.86356	5.549567	14.75134	0.0000
LOG(UMK)	-3.665260	1.130872	-3.241092	0.0014
LOG(DANA_DESA)	-0.112169	0.253046	-0.443275	0.6580
LOG(PDRB)	-0.015026	0.082031	-0.183175	0.8548
IPM	-0.215154	0.122237	-1.760143	0.0797
PENGANGGURAN	0.149308	0.055125	2.708542	0.0073

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961744	Mean dependent var	12.35835
Adjusted R-squared	0.956182	S.D. dependent var	3.418874
S.E. of regression	0.715663	Akaike info criterion	2.289750
Sum squared resid	116.2633	Schwarz criterion	2.754094
Log likelihood	-264.8124	Hannan-Quinn criter.	2.476402
F-statistic	172.9292	Durbin-Watson stat	1.268904
Prob(F-statistic)	0.000000		

c. Hasil Estimasi Random Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 10/12/24 Time: 11:27
Sample: 2015 2023
Periods included: 9
Cross-sections included: 29
Total panel (balanced) observations: 261
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	81.00277	5.251788	15.42385	0.0000
LOG(UMK)	-3.343042	1.016004	-3.290381	0.0011
LOG(DANA_DESA)	-0.070049	0.246939	-0.283670	0.7769
LOG(PDRB)	-0.014314	0.081722	-0.175159	0.8611
IPM	-0.280163	0.104608	-2.678219	0.0079
PENGANGGURAN	0.150981	0.054427	2.774028	0.0059

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	2.691478	0.9340
Idiosyncratic random	0.715663	0.0660

Weighted Statistics			
R-squared	0.652923	Mean dependent var	1.091083
Adjusted R-squared	0.646118	S.D. dependent var	1.207667
S.E. of regression	0.718417	Sum squared resid	131.6113
F-statistic	95.94163	Durbin-Watson stat	1.088584
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.324026	Mean dependent var	12.35835
Sum squared resid	2054.327	Durbin-Watson stat	0.069741

d. Pemilihan Model

1. Uji Chow

Uji Chow untuk memilih antara CEM atau FEM dengan dilihat nilai probabilitasnya < alpha 5% maka model terbaik adalah FEM.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: HASIL_LOG_FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	113.520810	(28,227)	0.0000
Cross-section Chi-square	706.845761	28	0.0000

Nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 < alpha 5% atau 0,05 maka model terbaik adalah FEM.

2. Uji Hausmant

   Uji Hausmant untuk memilih FEM atau REM dengan dilihat nilai probabilitasnya < alpha 5% maka model terbaik adalah FEM.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: HASIL_LOG_REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.966384	5	0.2232

Nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 0,2232 > alpha 5% atau 0,05 maka model terbaik adalah REM.

3. Uji LM

   Uji LM untuk memilih antara CEM atau REM dengan dilihat nilai probabilitasnya < alpha 5% maka model terbaik adalah REM.

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	807.3521 (0.0000)	2.778346 (0.0955)	810.1304 (0.0000)
Honda	28.41394 (0.0000)	1.666837 (0.0478)	21.27032 (0.0000)
King-Wu	28.41394 (0.0000)	1.666837 (0.0478)	14.86447 (0.0000)
Standardized Honda	30.75542 (0.0000)	2.498303 (0.0062)	19.77190 (0.0000)
Standardized King-Wu	30.75542 (0.0000)	2.498303 (0.0062)	13.46528 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	810.1304 (0.0000)

Nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000 < alpha 5% atau 0,05 maka model terbaik adalah REM.